

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Gunungkidul

Sewaktu Gunungkidul masih merupakan hutan belantara, terdapat suatu desa yang dihuni beberapa orang pelarian dari Majapahit. Desa tersebut adalah Pongangan, yang dipimpin oleh R. Dewa Katong saudara Raja Brawijaya. Setelah R. Dewa Katong pindah ke desa Katongan 10 km utara Pongangan, puteranya yang bernama R. Suromejo membangun desa Pongangan, sehingga semakin lama semakin ramai. Beberapa waktu kemudian, R. Suromejo pindah ke Karangmojo.

Perkembangan penduduk di daerah Gunungkidul itu didengar oleh Raja Mataram Sunan Amangkurat Amral yang berkedudukan di Kartosuro. Kemudian ia mengutus Senopati Ki Tumenggung Prawiropekso agar membuktikan kebenaran berita tersebut. Setelah dinyatakan kebenarannya, Tumenggung Prawiropekso menasehati R. Suromejo agar meminta izin pada raja Mataram, karena daerah tersebut masuk dalam wilayah kekuasaannya. R. Suromejo tidak mau, dan akhirnya terjadilah peperangan yang mengakibatkan dia tewas. Begitu juga dua anak dan menantunya.

Ki Pontjodirjo yang merupakan anak R. Suromejo akhirnya menyerahkan diri, oleh Pangeran Sambernyowo diangkat menjadi Bupati

Gunungkidul I. Namun Bupati Mas Tumenggung Pontjodirjo tidak lama menjabat karena adanya penentuan batas-batas daerah Gunungkidul antara Sultan dan Mangkunegaran II pada tanggal 13 Mei 1831. Gunungkidul (selain Ngawen sebagai daerah *enclave* Mangkunegaran) menjadi kabupaten di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Mas Tumenggung Pontjodirjo diganti Mas Tumenggung Prawirosetiko, yang mengalihkan kedudukan kota kabupaten dari Ponjong ke Wonosari.

Menurut Mr. R.M Suryodiningrat dalam bukunya "*Peprentahan Praja Kejawen*" yang dikuatkan buku *de Vorstenlanden* terbitan 1931 tulisan G.P Rouffaer, dan pendapat B.M.Mr.A.K Pringgodigdo dalam bukunya *Onstaan En Groei van het Mangkoenegorosche Rijk*, berdirinya Gunungkidul (daerah administrasi) tahun 1831 setahun se usai Perang Diponegoro, bersamaan dengan terbentuknya kabupaten lain di Yogyakarta. Disebutkan bahwa "*Goenoengkidoel, wewengkon pareden wetan lepen opak. Poeniko siti maosan dalem sami kaliyan Montjanagari ing jaman kino, dados bawah ipun Papatih Dalem. Ing tahoen 1831 Nagoragung sarta Mantjanagari-nipoen Ngajogjakarta sampoen dipoen perang-perang, Mataram dados 3 wewengkon, dene Pangagengipoen wewengkon satoenggal-satoenggalipoen dipoen wastani Boepati Wadono Distrik kaparingan sesebatan Toemenggoeng, inggih poeniko Sleman (Roemijin Denggong), Kalasan serta Bantoel. Siti maosan dalem ing Pengasih dipoen koewaosi dening Boepati Wedono Distrik Pamadjegan Dalem. Makanten oegi ing Sentolo wonten pengageng distrik ingkang*

kaparingan sesebatan Riya. Goenoengkidoel ingkang nyepeng siti maosan dalem sesebatan nipoen Riya”.

Upaya yang dilakukan panitia untuk melacak Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul tahun 1984 baik yang terungkap melalui fakta sejarah, penelitian, pengumpulan data dari tokoh masyarakat, pakar serta daftar kepustakaan yang ada, akhirnya ditetapkan bahwa Kabupaten Gunungkidul dengan Wonosari sebagai pusat pemerintahan lahir pada hari Jumat Legi tanggal 27 Mei 1831 atau 15 Besar Je 1758 dan dikuatkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gunungkidul No: 70/188.45/6/1985 tentang Penetapan hari, tanggal bulan dan tahun Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang ditandatangani oleh bupati saat itu Drs. KRT Sosro Hadiningrat tanggal 14 Juni 1985. Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan berkedudukan di Wonosari sebagai ibukota kabupaten, ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat. Guna mengabadikan Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul dibangun prasasti berupa tugu di makam bupati pertama Mas Tumenggung Pontjodirjo dengan bertuliskan Suryo sangkala dan Condro sangkala berbunyi: NYATA WIGNYA MANGGALANING NATA “HANYIPTA TUMATANING

SWAPROJO”. Menurut Suryo sangkala tahun 1831 dibalik 1381, sedang Condro sangkala 1758 dibalik 8571.

Sejak berdirinya Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini sudah tercatat 27 bupati yang pernah menjabat. Dua puluh tujuh bupati yang pernah memimpin Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- 1) Mas Tumenggung Pontjodirjo
 - 2) Raden Tumenggung Prawirosetiko
 - 3) Raden Tumenggung Suryokusumo
 - 4) Raden Tumenggung Tjokrokusumo
 - 5) Raden Tumenggung Padmonegoro
 - 6) Raden Tumenggung Danuhadiningrat
 - 7) Raden Tumenggung Mertodiningrat
 - 8) KRT. Yudodiningrat
 - 9) KRT. Pringgodiningrat
 - 10) KRT. Djojodiningrat
 - 11) KRT. Mertodiningrat
 - 12) KRT. Dirjodiningrat
 - 13) KRT. Tirtodiningrat
 - 14) KRT. Suryaningrat
 - 15) KRT. Labaningrat
 - 16) KRT. Brataningrat
 - 17) KRT. Wiraningrat
 - 18) Prawirosuwignyo
 - 19) KRT. Djojodiningrat, BA
 - 20) Ir. Raden Darmakun Darmokusumo
 - 21) Drs. KRT. Sosrodiningrat
 - 22) Ir. Soebekti Soenarto
 - 23) KRT. Harsodiningrat, BA
 - 24) Drs. KRT. Hardjohadinegoro (Drs. Yoetikno)
 - 25) Suharto, SH.
 - 26) Prof. Dr. Ir. Sumpeno Putro, M.Sc.
 - 27) Hj. Badingah, S.Sos. (Bupati saat ini)
- (Sumber: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013)

b. Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah DIY, dengan ibukotanya Wonosari. Kota Wonosari ini

terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi DIY) dengan jarak ± 39 km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak antara $7^{\circ} 46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 21' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul $1.485,36 \text{ km}^2$ atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi DIY.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1.416 dusun, 1.583 RW, dan 6.844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul yaitu: Paliyan, Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Kecamatan Semanu merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar $108,39 \text{ km}^2$ atau sekitar 7,30% luas Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 2. Peta Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan beberapa daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo (Provinsi Jawa Tengah). Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, DIY.

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan yaitu:

- 1) Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m–700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m–12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara.
- 2) Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m–200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m–120 m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara.
- 3) Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0 m–300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zona Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul termasuk ke dalam daerah yang beriklim tropis, dengan topografi wilayah yang didominasi dengan

daerah kawasan perbukitan karst. Wilayah selatan didominasi oleh kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di kawasan selatan kurang subur yang berakibat budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

c. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 tanggal 15 Maret 2010 ditetapkan visi Kabupaten Gunungkidul.

Visi Kabupaten Gunungkidul:

“Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025”.

Misi Kabupaten Gunungkidul:

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- 2) mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 3) mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- 4) mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- 5) mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
- 6) mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan sebagaimana tertuang pada visi pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
- 2) Terwujudnya pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Terwujudnya pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian.
- 4) Terwujudnya kemampuan keuangan daerah.
- 5) Terwujudnya penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai.
- 6) Terwujudnya pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

Arah Kebijakan Kabupaten Gunungkidul:

Arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan adalah:

- 1) Mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih.
 - a) Politik, pemerintahan, dan hukum
 - b) Aparatur dan administrasi publik daerah
 - c) Komunikasi dan informasi
- 2) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - a) Agama
 - b) Pendidikan
 - c) Kesehatan dan kesejahteraan sosial
 - d) Kebudayaan dan pariwisata
 - e) Kedudukan dan peranan perempuan
 - f) Pemuda dan olahraga
 - g) Pembangunan daerah
- 3) Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian.
- 4) Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai.
- 6) Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

Visi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010–2015:

“Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”.

Misi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010–2015:

- 1) Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah secara lestari.
- 3) Peningkatan pengelolaan pariwisata.
- 4) Pengembangan SDM yang terampil, profesional dan peduli.
- 5) Peningkatan iklim usaha yang kondusif.
- 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN.
- 7) Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

d. Potensi Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul mempunyai beragam potensi perekonomian mulai dari pertanian, perikanan dan peternakan, hutan, flora dan fauna, industri, tambang serta potensi pariwisata. Pertanian yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Lahan sawah beririgasi relatif sempit dan sebagian besar sawah tadah hujan. Sumber daya alam tambang yang termasuk golongan C berupa: batu kapur, batu apung, kalsit, zeolit, bentonit, tras, kaolin dan pasir kuarsa.

Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai panjang pantai yang cukup luas terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, membentang sepanjang sekitar 65 km dari Kecamatan Purwosari sampai Kecamatan Girisubo. Potensi hasil laut dan wisata sangat besar dan terbuka untuk dikembangkan. Potensi lainnya adalah industri kerajinan, makanan, pengolahan hasil pertanian yang semuanya sangat potensial untuk dikembangkan (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

e. Perekonomian dan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Secara makro, ekonomi Kabupaten Gunungkidul perekonomiannya didominasi sektor pertanian dalam arti luas yang berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB (33,84%). Prioritas utama sektor perekonomian adalah memacu pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil, menengah dan industri lokal. Sektor ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi sektor lainnya, akan tetapi ternyata peranannya belum optimal, terbukti kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul masih didominasi dari sektor pertanian. PDRB Kabupaten Gunungkidul atas dasar berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 7.250.682, kontribusi PDRB ini sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian 33,84%, sektor jasa-jasa 17,30%, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran 14,60%. Upaya pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Gunungkidul terus ditingkatkan.

Selain itu, untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor lain yang diharapkan prospektif dapat memberikan kontribusi besar adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Perkembangan sektor ini tercermin dalam meningkatnya jumlah koperasi aktif 204 unit dan pasar tradisional sebanyak 39 buah. Kondisi keuangan daerah saat ini semakin membaik, yang tercermin pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sebesar Rp. 54.462.418.772,18 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.920.387.383,57 (21,89%) dibandingkan tahun yang lalu, sementara itu rasio PAD terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5,77%. Penerimaan APBD pada tahun 2012 sebesar Rp. 879.921.168.345,86, sedangkan pengeluaran rutin/belanja tidak langsung Rp. 7.746.752.304.399,84 dan pengeluaran pembangunan/belanja langsung sebesar Rp. 2.328.575.807.431,5. Jumlah Dana Alokasi Khusus (pagu) Rp. 59.168.700.000,00 dengan realisasi sampai bulan Desember 2012 sebesar Rp. 59.156.800.000 atau 99,98% (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2013).

2. DPD PAN Kabupaten Gunungkidul

DPD PAN Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu perwakilan daerah PAN yang mewakili Kabupaten Gunungkidul. Sekretariat DPD PAN Kabupaten Gunungkidul ini bernama Rumah PAN Gunungkidul yang berkedudukan di Jl. Ring Road Utara Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Majelis Penasehat Partai Daerah (MPPD) DPD PAN Kabupaten Gunungkidul diketuai oleh Iswandi, dan Ketua DPD PAN Kabupaten Gunungkidul diketuai oleh H. M. Dodi Wijaya, SH. ST.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran PAN di Kabupaten Gunungkidul dibidani oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gunungkidul. Walaupun secara organisasional tetap tidak ada hubungan antara PAN dan Muhammadiyah, masing-masing independen. PAN di Gunungkidul oleh PDM diserahkan kepada 11 orang yang pada akhirnya disebut panitia sebelas penyusunan pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil pemikiran 11 orang tersebut yang dipadukan dalam

musyawarah terbentuklah Pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka penyusunan personal pengurus masih sangat berat dan penuh kendala apalagi di alam transisi. Namun demikian, dengan semangat dan kegigihan tim 11, akhirnya tersusun pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan ART PAN Bab III Pasal 16 ayat (1), DPD adalah pimpinan eksekutif tertinggi dalam memimpin partai di tingkat Kabupaten/Kota untuk masa jabatan lima tahun. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (2), disebutkan bahwa DPD berfungsi melaksanakan kerja-kerja partai di tingkat Kabupaten/Kota terkait konsolidasi, koordinasi dan optimalisasi kegiatan partai dalam menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPD tercantum dalam Pasal 16 ayat (3), yaitu:

- a. Menentukan kebijakan partai di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres dan Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Daerah, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah dan Rapat Kerja Daerah, dan keputusan partai lainnya sesuai Pedoman Organisasi;
- b. Melakukan konsolidasi organisasi secara struktural mulai dari Dewan Pimpinan Cabang hingga Dewan Pimpinan Ranting, Pimpinan Rayon dan Sub Rayon;
- c. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai hasil keputusan Musyawarah;
- d. Membatalkan, meluruskan, dan memperbaiki keputusan yang diambil oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, keputusan-keputusan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Pedoman Organisasi;
- e. Melakukan penyesuaian terhadap struktur kepengurusan yang ada di tingkat Dewan Pimpinan Daerah melalui penambahan atau pengurangan unit-unit kerja sesuai kebutuhan partai;

- f. Mengangkat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang ketika terjadi kekosongan jabatan pimpinan partai di tingkat tersebut;
- g. Melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya di tingkat Kabupaten/kota yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, Keputusan-keputusan rapat kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Daerah, serta keputusan-keputusan partai lainnya sesuai Pedoman Organisasi;
- h. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk lembaga, alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai program partai;
- i. Dewan pimpinan Daerah dapat melakukan pergantian fungsionaris pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengurus lembaga, alat kelengkapan partai, organisasi otonom, komite-komite aksi dan unit-unit kerja lainnya di tingkat Daerah melalui penambahan atau pengurangan komposisi personalia.

DPD PAN Kabupaten Gunungkidul sebagai sebuah organisasi yang dibawah oleh DPP PAN dan berpedoman pada AD/ART PAN, memiliki struktur organisasi yang terdiri dari MPPD, DPD, dan Bagian-bagian. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/12/A/Kpts/K-S/09/IV/2011 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2010–2015, susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Gunungkidul periode 2010–2015 adalah sebagai berikut:

MAJELIS PENASEHAT PARTAI DAERAH (MPPD)

Ketua	: Iswandi
Wakil Ketua	: Sutata
Sekretaris	: Achmad Roesbandi
Anggota	: Mardi Mulyo
Anggota	: Mardjiyo
Anggota	: Zuhari
Anggota	: Hirkam

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)

Ketua : **M. Dodi Wijaya**
 Wakil Ketua : Arif Setiadi
 Wakil Ketua : Bambang Susanto
 Wakil Ketua : Bardan Budi Santoso
 Wakil Ketua : Broto Priyono
 Wakil Ketua : Iswandi
 Wakil Ketua : Joko Susilo
 Wakil Ketua : Kaliman
 Wakil Ketua : Muh. Edi S.
 Wakil Ketua : Muh. Heri Sukriswanto
 Wakil Ketua : Muh. Yogandha Tyasmoko
 Wakil Ketua : Setyo Wibowo
 Wakil Ketua : Sriyatun
 Wakil Ketua : Sulistyo Rahardja
 Wakil Ketua : Supriyadi
 Wakil Ketua : Yunarka Wilopo
Sekretaris : **Sukrisno**
 Wakil Sekretaris : Anwarudin
 Wakil Sekretaris : Atmiatun
 Wakil Sekretaris : Bambang Supriyanto
 Wakil Sekretaris : Bintoro Setyo Raharjo
 Wakil Sekretaris : Gimun Yoga Sudarma
 Wakil Sekretaris : Hajar Ismadi
 Wakil Sekretaris : Kasno
 Wakil Sekretaris : Marsudi
 Wakil Sekretaris : Muh. Solihin
 Wakil Sekretaris : R. Wondo
 Wakil Sekretaris : Sarmidi
 Wakil Sekretaris : Supriyana
 Wakil Sekretaris : Sutino
 Wakil Sekretaris : Wasiran
 Wakil Sekretaris : Yuli Saptono
Bendahara : **Amri Dwi Sucahya**
 Wakil Bendahara : Agus Riyanto, S.H.
 Wakil Bendahara : Edi Purwanta
 Wakil Bendahara : Mariyem
 Wakil Bendahara : Muji Hartoyo
 Wakil Bendahara : Rahmad Triyanto
 Wakil Bendahara : Rakiman
 Wakil Bendahara : Slamet Triyono
 Wakil Bendahara : Subagyo
 Wakil Bendahara : Suharjo/Cokro
 Wakil Bendahara : Sumarlin

BAGIAN-BAGIAN

- a. Bagian Koordinasi Organisasi Otonom dan Kerjasama Antar Lembaga**
Ketua : Setyo Wibowo
Sekretaris : Sutino
- b. Bagian Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia**
Ketua : Bardan Budi Santoso
Sekretaris : Anwarudin
- c. Bagian Ekonomi, Koperasi, Jaringan Usaha dan Wirausaha**
Ketua : Broto Priyono
Sekretaris : Bambang Supriyanto
- d. Bagian Perkaderan**
Ketua : Muh. Heri Sukriswanto
Sekretaris : Supriyana
- e. Bagian Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK)**
Ketua : Supriyadi
Sekretaris : Muh. Solihin
- f. Bagian Sistem Informasi dan Komunikasi Politik**
Ketua : Yunarka Wilopo
Sekretaris : Hajar Ismadi
- g. Bagian Pemberdayaan Perempuan**
Ketua : Sriyatun
Sekretaris : Atmiatun
- h. Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**
Ketua : Sulistyo Rahardja
Sekretaris : R. Wondo
- i. Bagian Kebijakan Publik**
Ketua : Arif Setiadi
Sekretaris : Yuli Saptono
- j. Bagian Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan**
Ketua : Iswandi
Sekretaris : Wasiran
- k. Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah**
 - 1) Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan I (Kecamatan Wonosari, Semanu dan Playen)**
Ketua : Muh. Yogandha Tyasmoko
Sekretaris : Bintoro Setyo Raharjo
 - 2) Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan II (Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar dan Ngawen)**
Ketua : Muh. Edi S.
Sekretaris : Marsudi
 - 3) Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan III (Kecamatan Semin, Karangmojo, Ponjong)**
Ketua : Joko Susilo
Sekretaris : Kasno

4) Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan IV (Kecamatan Rongkop, Girisubo, Tepus dan Tanjungsari)

Ketua : Kaliman

Sekretaris : Gimun Yoga Sudarma

5) Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan V (Kecamatan Paliyan, Saptosari, Panggang dan Purwosari)

Ketua : Bambang Susanto

Sekretaris : Sarmidi

Sebagaimana perwakilan daerah lainnya, DPD PAN Kabupaten Gunungkidul membawahi DPC, DPRt, serta Pimpinan Rayon dan Sub Rayon. Dalam hal ini, terdapat sebanyak 18 DPC yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. DPC ini berlokasi di masing-masing kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 2. Daftar DPC PAN yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul

DPC	DPC	DPC
(1) Wonosari	(7) Ponjong	(13) Purwosari
(2) Playen	(8) Nglipar	(14) Tanjungsari
(3) Semanu	(9) Ngawen	(15) Panggang
(4) Gedangsari	(10) Semin	(16) Rongkop
(5) Patuk	(11) Paliyan	(17) Girisubo
(6) Karangmojo	(12) Saptosari	(18) Tepus

PAN merupakan golongan partai yang besar di Kabupaten Gunungkidul, di mana pada pemilu legislatif 2009 memperoleh 9 kursi dengan perolehan 65.937 suara sah atau 16,71%. PAN memperoleh urutan kedua setelah PDIP yang memperoleh 11 kursi dengan 84.845 suara atau 21,50%. Dengan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 tersebut, PAN sudah

memenuhi syarat menjadi partai pengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilukada tahun 2010.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Deskripsi Strategi Komunikasi Politik PAN dalam Memenangkan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Pertama kalinya dalam sejarah masyarakat Kabupaten Gunungkidul, DIY melakukan hajatan demokrasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2005. Hal pertama yang perlu disyukuri dari keberhasilan pelaksanaan pemilukada tersebut adalah bahwa agenda yang digelar lima tahunan sekali ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Sebagaimana *image* masyarakat Gunungkidul sendiri yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan penuh sopan santun.

Pemilukada langsung yang baru pertama kalinya digelar ini tentunya menghadirkan berbagai catatan selama pelaksanaannya. Pemilukada tahun 2005 di Kabupaten Gunungkidul diikuti oleh lima pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kelima pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain pasangan Drs. Sugito, M.Si dan Dra. Nuniek Tasnim Haryani, Drs. Gandung Pardiman, MM dan Untung Santosa, SE, MA., Drs. Siswanto, MM dan W. Noer Iman, SE, MBA., Drs. Yoetikno dan H. M. Sukamto, S.Ag., serta Suharto, SH dan Hj. Badingah, S.Sos. Dalam pemilukada ini sebanyak 395.107 penduduk Gunungkidul menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala

daerah, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 187.638 orang dan pemilih perempuan sebanyak 207.469 orang. Sedangkan sebanyak 131.698 penduduk Gunungkidul tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu pada tahun 2005 lalu, dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 68.885 orang dan pemilih perempuan sebanyak 62.813 orang (Data KPUD Kabupaten Gunungkidul 2005).

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2005 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul, jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 391.156 suara dan jumlah perolehan suara tidak sah sebesar 14.207 suara. Kemudian dari keseluruhan jumlah perolehan suara yang sah tersebut, pasangan Suharto, SH dan Hj. Badingah, S.Sos yang diusung PAN mampu mengungguli empat pasangan lainnya dengan memperoleh 126.514 suara. Sedangkan keempat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah lain memperoleh suara sebagai berikut:

- a. Drs. Sugito, M.Si dan Dra. Nuniek Tasnim Haryani: 93.173 suara.
- b. Drs. Gandung Pardiman, MM dan Untung Santosa, SE, MA: 75.957 suara.
- c. Drs. Siswanto, MM dan W. Noer Iman, SE, MBA: 31.606 suara.
- d. Drs. Yoetikno dan H. M. Sukamto, S.Ag: 63.906 suara.

Pasangan Suharto, SH dan Hj. Badingah, S.Sos ini mampu menang di enam kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Keenam

kecamatan tersebut adalah Wonosari, Playen, Patuk, Karangmojo, Ponjong, dan Paliyan.

Selanjutnya, pada tahun 2009 Kabupaten Gunungkidul mengadakan pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan kewenangannya, maka kemudian KPUD Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu legislatif yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul tersebut menghasilkan keputusan bahwa dari sejumlah partai politik yang ada di Kabupaten Gunungkidul, hanya ditetapkan 34 partai politik. Namun demikian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang adanya empat partai politik yang dapat ikut sebagai peserta pemilu, maka jumlah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 38 partai politik. Dengan keterangan bahwa empat partai politik tidak ada kepengurusannya, empat partai politik tidak ada calon legislatifnya, dan 30 partai politik lengkap dengan kepengurusan dan calon legislatif (KPUD Gunungkidul, 2012).

Tabel 3. Prosentase Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

No.	Jenis Suara	Jumlah Suara			Prosentase (%)		
		DPR	DPRD Prov	DPRD Kab.	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab.
1.	Suara Sah	376.485	377.369	394.525	86,35	86,55	90,48
2.	Suara Tidak Sah	59.536	58.652	41.496	13,65	13,45	9,52
JUMLAH		436.021	436.021	436.021	100	100	100

(Sumber: KPUD Gunungkidul, 2012)

Jumlah perolehan suara sah untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilu legislatif tahun 2009 tercatat bahwa masing-masing memperoleh suara sebanyak 376.485, 377.369, dan 394.525 dengan prosentase suara masing-masing sebesar 86,35%, 86,55%, dan 90,48%. Sedangkan perolehan suara yang tidak sah untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah 59.536, 58.652, dan 41.496 suara dengan prosentase suara masing-masing sebesar 13,65%, 13,45%, dan 9,52%. Kemudian jumlah keseluruhan perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Gunungkidul adalah 436.021 suara.

Tabel 4. Prosentase Suara DPD

No.	Jenis Suara	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1.	Suara Sah	383,825	88,03 %
2.	Suara Tidak Sah	52,196	11,97 %
JUMLAH		436.021	100 %

(Sumber: KPUD Gunungkidul, 2012)

Jumlah perolehan suara sah untuk DPD pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah 383.825 suara atau dengan prosentase suara sebesar 88,03%. Sedangkan perolehan suara yang tidak sah untuk DPD pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah 52.196 suara atau dengan prosentase suara sebesar 11,97%. Kemudian jumlah keseluruhan perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPD pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah 436.021 suara.

Tabel 5. Prosentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih

No.	Jenis Pemilih	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1.	Pemilih yang menggunakan hak pilih	436.021	75,14 %
2.	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	145.164	14,86 %

(Sumber: KPUD Gunungkidul, 2012)

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2009 sebanyak 436.021 pemilih atau dengan prosentase sebesar 75,14%. Sedangkan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2009 sebanyak 145.164 pemilih. Jika diprosentasikan, maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif tahun 2009 adalah 14,86%.

Berikut ini disajikan pula data sejumlah partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gunungkidul, setelah dilakukan verifikasi oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul:

**Tabel 6. Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009
di Kabupaten Gunungkidul**

No.	Nama Partai Politik	No.	Nama Partai Politik
1.	Partai Hanura	20.	PDK
2.	PKPB	21.	Partai Republikan
3.	PPPI	22.	Partai Pelopor
4.	PPRN	23.	Partai Golkar
5.	Partai Gerindra	24.	PPP
6.	Partai BARNAS	25.	PDS
7.	PKPI	26.	PNBKI
8.	PKS	27.	PBB
9.	PAN	28.	PDIP
10.	PIIB	29.	PBR
11.	Partai Kedaulatan	30.	Partai Patriot
12.	PPD	31.	Partai Demokrat
13.	PKB	32.	PKDI
14.	PPI	33.	PIS
15.	PNI Marhaenisme	34.	PKNU
16.	PDP	41.	Partai Merdeka
17.	PKP	42.	PPNUI
18.	PMB	43.	PSI
19.	PPDI	44.	Partai Buruh

(Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2009)

Kursi yang diperebutkan dalam pemilu legislatif untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009 tersebut yakni berjumlah 45 kursi. Berdasarkan hasil pemilu legislatif tersebut, PDIP merupakan partai yang mengantongi jumlah kursi terbanyak yakni 11 kursi di legislatif dengan perolehan 84.540 suara. Kemudian disusul oleh PAN dengan jumlah kursi sebanyak 9 dengan perolehan 65.937 suara, di urutan ketiga ditempati oleh Partai Golkar dengan jumlah kursi sebanyak 5 dengan perolehan 51.014 suara, di urutan keempat adalah Partai Demokrat yang juga menduduki 5

kursi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 43.494. Di urutan selanjutnya adalah PKS dengan 4 kursi, PKB 3 kursi, PKPB dan Partai Gerindra 2 kursi, serta PDP, PPP, PBB, dan PPRN memperoleh 1 kursi (Data KPUD Kabupaten Gunungkidul tahun 2009). Dengan demikian, kedua belas partai tersebut merupakan partai yang memiliki basis massa yang cukup signifikan serta mampu menjadi pendukung mereka dalam menjalankan aktivitas politik dan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul.

Konstelasi politik di Gunungkidul tentunya dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan partai-partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut dengan segala dinamika dan komposisinya masing-masing. Sementara itu bagi partai-partai non-kursi di parlemen, keberadaan mereka hanyalah sebagai pelengkap dan pendukung bagi proses kepentingan partai yang memiliki kursi di DPRD. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa posisi tawar yang mereka miliki di masyarakat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. Oleh karena itulah, berbagai macam aturan dan kebijakan yang ada di Gunungkidul ini sebenarnya lahir dari akumulasi kepentingan partai-partai yang memiliki kursi di DPRD.

PDIP sebagai partai nomor satu di Kabupaten Gunungkidul tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai pengambilan kebijakan di Gunungkidul, mulai dari penempatan di lingkungan pemerintah daerah sampai pada aturan yang menyangkut kepentingan masyarakat di Gunungkidul. Keberadaan PDIP ini memang sangat diperhitungkan, karena

mereka memiliki basis massa yang banyak dan kuat di Gunungkidul. Sementara bagi partai-partai lain di parlemen, mereka memosisikan diri sebagai *partner* bagi PDIP dalam mengambil setiap kebijakan dan membuat regulasi di Kabupaten Gunungkidul, meskipun sebelumnya juga didahului dengan adanya pro-kontra untuk menetapkan kebijakan yang diambil.

PAN sebagai partai nomor dua di Kabupaten Gunungkidul tentunya memiliki posisi tawar yang dapat dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan komposisi perwakilan mereka yang ada di parlemen cukup banyak. Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 07/Pemilukada/2009 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 disebutkan sebagai berikut:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari 45 jumlah kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul atau 7 kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul.
- b. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atau 15% dari 394.525 atau 59.179 suara sah.

Mengingat hal tersebut, maka PAN sendiri tidak begitu mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 yang dikeluarkan

oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itulah PAN optimis untuk maju menjadi partai pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan pada 23 Mei 2010.

a. Deskripsi Tahapan Pemilukada PAN Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

1) Persiapan Rekrutmen Politik DPD PAN Kabupaten Gunungkidul

Sebagai partai yang cukup diperhitungkan dalam perpolitikan Kabupaten Gunungkidul, PAN mempunyai aturan main dan mekanisme sendiri dalam setiap tahap pengajuan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusungnya dalam Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Termasuk dalam melakukan proses rekrutmen politiknya, yaitu dengan melalui serangkaian proses seleksi untuk menentukan siapa bakal calon yang akan diusung PAN. Hal ini tentunya juga ada kaitannya dengan usaha PAN sebagai partai untuk mempertahankan eksistensi dan stabilitasnya dalam menjalankan mesin partai.

Persiapan PAN dalam rangka mengadakan rekrutmen dan seleksi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusungnya pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 memang lebih awal jika dibandingkan dengan partai lain. Hal ini dilakukan dengan harapan agar banyak orang-orang yang potensial

bisa dibidik oleh PAN, sedangkan dari partai lain belum ada yang membidik. Dengan proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan lebih awal, tentunya *start* untuk melakukan berbagai kegiatan juga bisa lebih dulu siap dibandingkan yang lain. Pertimbangan lainnya adalah dikarenakan melihat sumber pendanaan partai yang kalah dibandingkan dengan yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Amri Dwi Suahya, S.Si selaku Bendahara Pemenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari PAN (wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2013 pukul 08.50–09.45, di kediaman beliau di Wonosari):

“Persiapan PAN dalam rangka mengadakan rekrutmen dan seleksi untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu paling awal dibandingkan partai lain. Kurang lebih sudah diadakan satu tahun sebelum yang lain melakukan proses rekrutmen. Kami memilih paling awal ini dengan harapan banyak orang-orang potensial yang lumayan banyak itu bisa dibidik, sedangkan yang dari partai lain belum ada. Dengan proses rekrutmen dan seleksi yang lebih awal ini tentunya *start* kegiatan juga lebih dulu siap. Hal ini dikarenakan melihat sumber pendanaan kami yang kalah dibandingkan dengan yang lain”.

Persiapan rekrutmen politik yang dilakukan DPD PAN Gunungkidul diawali dengan mempelajari dan mendalami pedoman organisasi. Setelah itu melaksanakan apa yang ada dalam pedoman organisasi tersebut, yang disesuaikan dengan dinamika politik yang ada. Berdasarkan Ketetapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PAN Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPD PAN

Gunungkidul melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan PemiluKada di Gunungkidul. Langkah pertama kali yang dilakukan DPD PAN Gunungkidul adalah memberikan laporan tentang rencana jadwal PemiluKada di Gunungkidul kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Seperti yang dikemukakan oleh Arif Setiadi, S.IP selaku Sekretaris Pemenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari PAN (wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2013 pukul 10.05–10.55, di Ruang Fraksi PAN DPRD Kabupaten Gunungkidul):

“Persiapannya dengan mempelajari dan mendalami pedoman organisasi, kemudian melaksanakan pedoman organisasi itu disesuaikan dengan dinamika politik. Panitia melakukan beberapa tahapan sampai munculnya calon”.

Sejak bulan Agustus 2009, DPD PAN Gunungkidul telah melakukan kajian secara intensif tentang SK Rakernas tentang PemiluKada dan dilanjutkan dengan rapat-rapat lain yang bertujuan untuk membahas seputar PemiluKada PAN Gunungkidul. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2009 diadakan rapat koordinasi DPC PAN se-Gunungkidul, DPD PAN Gunungkidul, dan DPW PAN DIY tentang PemiluKada PAN Gunungkidul. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober dibentuklah Tim PemiluKada PAN Gunungkidul yang sering disebut Tim 9 DPD PAN Gunungkidul. Tim 9 bertugas melakukan rekrutmen dan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Gunungkidul 2010–2015. Dengan dibentuknya tim PemiluKada PAN

Gunungkidul tersebut, sejak tanggal 17 s/d 31 Oktober 2009 dibukalah pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PAN.

Selain beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, ada pula diskusi-diskusi politik untuk membahas seputar Pemilukada PAN Gunungkidul yang salah satunya dilaksanakan di Ruang Fraksi PAN Gunungkidul oleh Tim 9 DPD PAN Gunungkidul beserta beberapa orang yang lain. Dalam diskusi politik itu terjadi tarik ulur mengenai kepala daerah yang kemungkinan bisa diusung oleh PAN. Ada pilihan untuk mengusung bupati *incumbent* lagi yang pada Pemilukada Gunungkidul tahun 2005 memang diusung oleh PAN, maupun calon bupati yang sebelumnya belum pernah diusung oleh PAN. Sebagaimana yang disampaikan oleh H. Heri Kriswanto, S.Ag selaku Tim Sukses Pemenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari PAN (wawancara dilakukan pada tanggal 06 Mei 2013 pukul 09.50–10.40, di Ruang Fraksi PAN DPRD Kabupaten Gunungkidul):

“Saat itu persiapannya antara lain dengan melakukan diskusi-diskusi politik termasuk di Ruang Fraksi PAN ini, yang dilakukan kurang lebih oleh 9 orang itu kemudian ditambah saya, Pak Sukrisno, dan Pak Yuli Saptono. Pada saat itu memang terjadi tarik ulur-tarik ulur pendapat. Akhirnya, wakil ketua dewan yaitu Drs. Sutata berketetapan untuk mengundang Sumpeno Putro untuk bisa ketemu dengan Partai Amanat Nasional. Tapi sebelumnya banyak opsi, Pak Harto lagi, terus juga Pak Dalil Suhadi”.

PAN menerapkan sistem rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sifatnya terbuka dan apa adanya. Terbuka di sini mengandung pengertian bahwa PAN menyeleksi untuk memilih yang terbaik dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip atau visi atau misi yang dimiliki PAN itu sendiri. Artinya, PAN membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang merasa layak dan siap untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Gunungkidul, dengan tidak membatasi pada satu golongan atau kader struktural partai saja. Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Sutata selaku Ketua Pemenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 dari PAN (wawancara dilakukan pada tanggal 04 Mei 2013 pukul 16.10–16.55, di kediaman beliau di Bansari):

“Dalam rangka mengadakan rekrutmen dan seleksi untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada dasarnya PAN sifatnya terbuka dan apa adanya. Maksud terbuka di sini bahwa PAN menyeleksi untuk memilih yang terbaik dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip atau visi atau misi yang dimiliki PAN itu sendiri. Proses rekrutmennya sendiri diantaranya dengan mengadakan seleksi *fit and propertest*, uji petik serta visi atau misi yang dimiliki oleh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

2) Mekanisme Rekrutmen Politik DPD PAN Kabupaten Gunungkidul

Proses rekrutmen politik DPD PAN Gunungkidul pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menyaring calon serta mencari orang

yang paling layak diusung sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Amri Dwi Suahya, S.Si:

“Proses rekrutmen itu sebenarnya adalah proses menyaring calon untuk mencari orang yang paling layak diusung sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah....”

Sewaktu dibentuknya Tim 9 DPD PAN Gunungkidul pada tanggal 14 Oktober 2009, maka kemudian dibukalah pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PAN dari tanggal 17 s/d 31 Oktober 2009. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Tim 9 bertugas melakukan rekrutmen dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Gunungkidul 2010–2015. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sukrisno, S.Pt., selaku Sekretaris Eksekutif DPD PAN Kabupaten Gunungkidul (wawancara dilakukan pada tanggal 06 Mei 2013 pukul 10.45–11.25, di Ruang Fraksi PAN DPRD Kabupaten Gunungkidul):

“Persiapannya pada waktu itu DPD dengan kepanitiaan tim sembilannya bekerja untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPD menerima pendaftaran calon, kemudian mengadakan serangkaian seleksi”.

Sejak tanggal 17 Oktober 2009 tersebut, divisi pendaftaran melakukan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hingga akhir pendaftaran tercatat 3 (tiga) bakal calon kepala daerah dan 1 (satu) calon wakil kepala daerah, antara lain:

Tiga calon kepala daerah yang mendaftar ke PAN, yaitu:

- a) H. Dalil Suhadi, SE.

b) Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc.

c) H. Suharto, SH.

Satu calon wakil kepala daerah yang mendaftar ke PAN, yaitu:

a) Hj. Badingah, S.Sos.

Selanjutnya pada tanggal 1 s/d 4 November 2009 tim melakukan verifikasi data bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di PAN. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi dari semua bakal calon serta ada *fit and propertest* di hadapan 300 pengurus PAN baik di tingkat DPRt, DPC, DPD, DPW, MPP DPD, BM PAN Gunungkidul, Sekar Surya, Simpatik se-Gunungkidul, yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2009 di Gedung PDHI Gunungkidul. Dari hasil *fit and propertest* di hadapan panelis tersebut, kemudian dilakukan penskoran dari pemaparan visi dan misi, komitmen, dan lain-lain.

Hasil penskoran dari *fit and propertest* tersebut, selanjutnya oleh tim dilaporkan kepada DPD PAN Gunungkidul di hadapan peserta yang hadir pada rapat pleno/rapat penetapan calon kepala daerah menjadi dua pasang calon kepala daerah di PDHI Gunungkidul. Selain itu juga dibacakan hasil *polling* Pusdekham sebelum rapat penetapan dilaksanakan. Rapat penetapan calon kepala daerah dari PAN dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2009 di Gedung PDHI Gunungkidul dan dihadiri oleh 131 peserta rapat. Hasil *voting*

penetapan pasangan calon menjadi 2 pasang calon kepala daerah adalah:

- a) Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc memperoleh 75 suara.
- b) H. Suharto, SH memperoleh 56 suara.
- c) H. Dalil Suhadi, SE tidak memperoleh suara.

Hal-hal yang dikemukakan di atas seperti yang diungkapkan oleh H. M. Dodi Wijaya, SH.,ST selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Gunungkidul (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 09.10–10.15, di Sekretariat DPD PAN Kabupaten Gunungkidul):

“... Jadi kita pada waktu itu membuka pendaftaran, tapi itu sendiri-sendiri. Calon bupati sendiri, wakil bupati sendiri. Jadi tidak pasangan (bukan paket), kan ada yang paket calon bupati sekaligus wakil bupati. Kemudian dari calon yang mendaftar itu kita mengadakan seleksi untuk menetapkan calon yang akan diusung oleh PAN. Saat itu ada yang namanya *fit and propertest* sebagai salah satu contoh penilaian calon yang terdiri dari banyak sekali poin-poin. Poin-poin itu akhirnya dinilai, terus diplenokan. Pada waktu itu rapat pleno diadakan di PDHI pada tahun 2009. Jadi, setelah diplenokan itu kita tahu calon bupati yang bagus ini dan wakil bupati yang bagus ini. Lalu yang berhak memasang calon itu adalah kita, PAN-nya sendiri”.

Setelah proses rapat penetapan calon menjadi dua pasangan, maka selanjutnya hasil rapat penetapan calon tersebut diajukan ke DPW PAN DIY untuk mendapatkan rekomendasi dari DPW PAN DIY.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009, DPW PAN DIY melaksanakan rapat pengurus harian DPW PAN DIY untuk memutuskan satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala

daerah dari PAN Gunungkidul. Dan *pasca* rapat PH DPW PAN DIY pada tanggal 28 Desember 2009 tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: PAN/12/Kpts/K-S/10/XII/2009 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Periode 2010–2015 dari Partai Amanat Nasional yang memutuskan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos sebagai calon bupati dan wakil bupati dari PAN Kabupaten Gunungkidul. Keputusan yang diambil DPW PAN tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan usulan dari daerah, seperti yang dikemukakan oleh Amri Dwi Suahya, S.Si:

“... Awalnya para calon itu diperkenalkan ke tingkat *grass root*, lalu ada serangkaian *fit and propertest*, serta beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis independen yang tidak punya afiliasi dengan partai yang berasal dari staff ahli provinsi, LSM, dosen UGM, dll. Waktu itu ada 3 calon kepala daerah yang mendaftarkan, kemudian calon-calon tersebut diusulkan ke DPW lalu DPW pula yang memutuskan berdasarkan rekomendasi dari daerah, yaitu dilihat dari skor *fit and propertest*, skor penjarangan serta tingkat keberpihakan ke partai. Selain skor-skor itu ditambah pula skor dari tingkat kecamatan yang berdasarkan usulan mereka, dan hasilnya itu tidak berbeda dengan kami yang ada di daerah”.

Pasca dikeluarkannya dan diserahkannya Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PAN tersebut oleh DPW PAN DIY, DPD PAN Gunungkidul selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2010 menggelar rapat koordinasi dengan pengurus harian DPD dan DPC PAN se-Gunungkidul. Kemudian dilanjutkan rapat koordinasi DPD PAN Gunungkidul dengan calon kepala daerah dan calon wakil

kepala daerah pada tanggal 5 Januari 2010. Setelah itu, diadakan rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 12 Januari 2010.

Disusul kemudian dengan rapat pembentukan tim kampanye dan pemenangan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos Kabupaten Gunungkidul yang diambil dari pengurus PAN dan relawan pendukung pasangan calon, pada tanggal 13 Januari 2010. Dan pada hari Minggu, 17 Januari 2010 pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos dideklarasikan di Balai Desa Wonosari yang dihadiri ± 2500 orang. Peserta yang menghadiri acara deklarasi ini terdiri dari pengurus DPRt, DPC PAN se-Gunungkidul, DPD PAN se-Gunungkidul, BM PAN, SIMPATIK, SEKAR SURYA, DPW PAN DIY, relawan dan laskar-laskar pendukung Sumpeno–Badingah yang memiliki jargon “*Ndeso Makmur Gunungkidul Makmur*”.

3) Tahap Pemenangan Sumpeno-Badingah

Tahap selanjutnya, tim kampanye dan pemenangan pasangan Sumpeno–Badingah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 21 Januari 2010 *pasca* deklarasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pemenangan pasangan Sumpeno–Badingah. Hasil rapat mengamanatkan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh jajaran elemen partai baik di tingkat ranting dan cabang, koordinasi dan sosialisasi di seluruh jajaran pengurus DPRt PAN se-Gunungkidul di DPC PAN se-Gunungkidul.

Road Show koordinasi dan sosialisasi ke seluruh jajaran elemen partai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010. Hingga tanggal 31 Januari 2010 baru terlaksana 16 DPC PAN se-Gunungkidul, sedangkan dua DPC dapat melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi yaitu DPC PAN Ponjong dan DPC PAN Semanu baru pada bulan Februari 2010. Selanjutnya *pasca Road Show* tersebut, tim kampanye serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah pemenangan selanjutnya. Selain itu tim maupun calon telah melakukan sosialisasi yang rata-rata sehari 5–10 tempat, dan sebagai bagian dari tertib manajemen agar terjadi sinkronisasi dalam sosialisasi diputuskan bahwa ada “Gerakan Semarak Sosialisasi” di Padukuhan se-Gunungkidul, dan menetapkan satu pintu penjadwalan di Sekretariat Pemenangan di DPD PAN Gunungkidul.

4) Konstelasi Politik Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah Gunungkidul secara langsung bagi bakal calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftar jika memenuhi syarat memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% atau 7 kursi dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul atau memperoleh suara sah pada Pemilu

anggota DPRD tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah 394.525 suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yaitu 59.179 suara sah. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, maka hanya PDIP (11 kursi) dan PAN (9 kursi) yang dapat mengajukan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai yang lain. Sementara partai-partai lain harus berkoalisi agar dapat mengusung calon bupati-wakil bupati dalam pilkada tersebut.

Terdapat empat pasang calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang menjadi kandidat dalam Pilkada Gunungkidul tahun 2010. Meski dapat mengajukan calon tanpa berkoalisi, PDIP akhirnya berkoalisi dengan PKB mengusung pasangan H. Suharto, SH-H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I. Sedangkan Partai Golkar berkoalisi dengan Partai Demokrat, PPRN, PDP dan PKPI mengusung pasangan H. Sutrisno, SE-Slamet, S.Pd, MM.

PAN yang berhak mengajukan calon tanpa berkoalisi, mengusung pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno, M.Sc-Hj Badingah, S.Sos. Pasangan ini didukung oleh PKS yang tidak dapat mengajukan calon secara mandiri, yang mendeklarasikan diri pada tanggal 8 Februari 2010 di Joglo Jawa Wonosari. Terakhir, koalisi PKPB, Partai Gerindra, PBB, Partai Hanura, Partai Barnas, PPDI, PDK, PDS mengusung pasangan H. Yanto, SH-Ngadiyono.

Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc adalah “orang baru” di Gunungkidul. Meski lahir dan besar di Kabupaten Gunungkidul,

tetapi dirinya telah sejak lama mengabdikan diri di Kementerian Kelautan Republik Indonesia dengan kantor di Jakarta. Dua pasangan lainnya, H. Suharto, SH dan H. Sutrisno, SE sebelumnya pernah menjadi kepala daerah. H. Suharto, SH dalam masa pencalonan kepala daerah tahun 2010 masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan H. Sutrisno, SE adalah mantan Kepala Daerah Kabupaten Pacitan yang juga pemilik Perusahaan Otobus (PO) Maju Lancar, salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang transportasi di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan H. Yanto, SH adalah seorang pengusaha yang belum memiliki pengalaman dalam dunia pemerintahan.

Potensi kemenangan pasangan calon Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos adalah:

- a) Pasangan calon adalah pasangan asli Gunungkidul.
- b) Pasangan calon memiliki jaringan dan silsilah trah keluarga yang besar.
- c) Calon bupati yang memiliki rekam pengalaman dan pendidikan yang luas (35 tahun di Jakarta dan pernah di luar negeri 15 tahun).
- d) Calon wakil bupati perempuan (satu-satunya calon perempuan) yang dikaitkan dengan pemilih perempuan yang besar (53%).
- e) *Track record* bakal calon yang relatif bersih.
- f) Wakil bupati yang merupakan tokoh yang dikenal di Gunungkidul dan sekaligus Penasehat 'Aisyiyah Gunungkidul atau sebagai representatif Muhammadiyah.
- g) Wakil bupati yang merupakan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan di Gunungkidul, hal ini dapat dibuktikan dengan 29 organisasi di Gunungkidul diikuti Hj. Badingah, S.Sos.
- h) Dukungan luas dari petani, nelayan, buruh, birokrat, PNS, dan perangkat se-Gunungkidul.
- i) Serta dukungan dari elemen-elemen sayap partai lain.

j) Dukungan lintas agama se-Gunungkidul.

Dari berbagai potensi yang ada tersebut di atas dan strategi yang direncanakan dapat dipetakan kekuatan pasangan Sumpeno–Badingah sebagai berikut:

Tabel 7. Peta Kekuatan Pasangan Sumpeno–Badingah

No.	Kecamatan	Prediksi
1.	Wonosari	PMT
2.	Semanu	PMT
3.	Playen	PMS
4.	Patuk	PMT
5.	Gedangsari	PMS
6.	Nglipar	PMT
7.	Ngawen	PMR
8.	Semin	PMT
9.	Karangmojo	PMT
10.	Ponjong	PMT
11.	Rongkop	PMR
12.	Girisubo	PMR
13.	Tepus	PMT
14.	Tanjungsari	PMS
15.	Paliyan	PMT
16.	Saptosari	PMS
17.	Panggung	PMR
18.	Purwosari	PMR

Keterangan:

PMT: Potensi Menang Tinggi

PMS: Potensi Menang Sedang

PMR: Potensi Menang Rendah

Potensi besar yang ada tersebut, tentunya memerlukan strategi pemenangan yang tepat, cermat, dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Hal ini tentunya juga tidak boleh menafikkan biaya politik atau pendanaan yang harus memadai.

Segala potensi yang ada harus terus digerakkan, dukungan seluruh elemen partai adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan kemenangan dalam pemilukada tersebut.

5) Membangun Koalisi ala DPD PAN Kabupaten Gunungkidul

Koalisi sebagai salah satu sarana untuk membangun kekuatan, sebagian besar tidak lain didasarkan pada alasan praktis dan pragmatis. Sangat jarang koalisi dibangun atas dasar ideologi dan garis perjuangan partai. Koalisi di sini berarti menyatukan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang masih mendasarkan diri pada segmentasi santri–abangan dan konsepsi patron–klien yang merupakan tradisi dan budaya Jawa sebagai salah satu bentuk rekrutmen massa pemilih yang masih dianggap efektif. Maka koalisi yang harus dibangun adalah bagaimana sedini dan sebanyak mungkin merekrut massa pemilih, dengan menggali dan menjalin kekuatan kelompok dari dan dengan pimpinan dan massa kelompok tertentu. Konsepsi ini sangat dangkal, tapi dapat dijadikan salah satu dasar dan alasan membangun koalisi yang sebenarnya.

Dalam hal Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, PAN sebagai pengusung pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos pada akhirnya juga melakukan kerja sama dengan PKS. Seperti yang dikemukakan oleh H. Heri Kriswanto, S.Ag:

“.... Kemudian pada waktu itu adapula partai pendukung calon yaitu PKS, yang ikut bergabung setelah kami mendaftarkan diri ke KPUD”.

Pasangan ini didukung oleh PKS yang tidak dapat mengajukan calon secara mandiri, yang mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan PAN pada tanggal 8 Februari 2010 di Joglo Jawa Wonosari. Tidak dipungkiri bahwa akhirnya PKS pun ikut berperan serta dalam rangka memenangkan pasangan yang diusung PAN pada pemilukada Gunungkidul tahun 2010.

6) Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Demam pemilukada diawali dengan keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditandatangani Presiden Megawati pada tanggal 15 Oktober 2004. Dalam hal pemilukada, KPUD dipercaya sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab kepada publik. Kemudian dalam hal pemilukada, pada dasarnya domain KPUD terdiri dari tiga jenis, yaitu: membuat aturan (*electoral regulation*), melaksanakan aturan (*electoral process*), dan bersama panitia pengawas menegakkan aturan (*electoral law enforcement*).

Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Peraturan perundangan ini dibuat sebagai revisi dari Undang-undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilukada. Untuk mendukung pelaksanaan pemilukada di tingkat teknis, pemerintah pusat juga mengeluarkan peraturan berupa: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas PP Nomor Nomor 6 tahun 2005, serta (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 tahun 2005.

Pemilukada sebenarnya berfungsi sebagai *training ground* dan persiapan karier politik lanjutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya sejumlah anggota DPR dan DPD justru “turun tingkat” untuk ikut serta bersaing dalam pemilukada. Sesuai ketentuan yang ada, anggota DPR dan DPD cukup meminta izin pimpinan untuk menjadi calon tanpa mundur sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hingga saat ini, kesetaraan politik dirasakan masih menjadi impian. Hal ini dikarenakan partai menjaga “pintu” pencalonan, yang identik dengan politik uang dan kecilnya akses tokoh non-partai. Sebagian kecil partai tidak memiliki kepercayaan diri sebagai sumber kepemimpinan, tetapi lebih memilih untuk menjaga “pintu” pencalonan bagi PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian

Republik Indonesia (Polri), dan tokoh masyarakat. Sehingga pada akhirnya muncul wacana untuk dibukanya akses bagi calon independen.

Pemilukada yang terjadi di beberapa daerah ada yang mengakibatkan permasalahan, diantaranya pemilukada yang diadakan itu justru menimbulkan “kekosongan” pemerintahan dan stagnasi pembangunan di daerahnya. Hal ini dikarenakan terjadinya persaingan antara pejabat lama (*incumbent*) dan sekretaris daerah. Selain itu, pemilukada di sejumlah daerah juga melahirkan instabilitas politik dan konflik primordial karena kelemahan sistem dan ketidaksiapan menerima kekalahan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pemilukada hanya sedikit yang memiliki legitimasi kuat, karena sistem penetapan calon terpilih sangat ringan. Dalam kenyataannya hampir di semua pemilukada yang terjadi rata-rata diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon. Oleh karena itulah kemenangan kepala daerah dan wakilnya dapat diraih cukup dengan suara terbesar. Sehingga bukan menjadi suatu kebetulan apabila kemudian pejabat lama lebih banyak memenangkan kompetisi pemilukada dibandingkan penantangannya.

Pemilukada Kabupaten Gunungkidul pada hari Minggu, 23 Mei 2010 merupakan hajatan demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Gunungkidul yang dilakukan untuk

kedua kalinya dalam sejarah masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Hal pertama yang perlu disyukuri dari keberhasilan pelaksanaan pemilukada tersebut adalah bahwa agenda yang digelar lima tahunan sekali ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Sebagaimana *image* masyarakat Gunungkidul sendiri yang selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan penuh sopan santun.

Pemilukada Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 ini diikuti oleh 16 partai politik yang mengusung empat pasangan calon. Nomor urut 1 pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I yang diusung oleh gabungan partai politik: PDIP dan PKB, nomor urut 2 pasangan H. Sutrisno, SE–Slamet, S.Pd, MM yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Golkar, PPRN, PDP, dan PKPI. Kemudian nomor urut 3 pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos yang diusung oleh PAN, dan yang terakhir nomor urut 4 pasangan H. Yanto, SH–Ngadiyono yang diusung oleh gabungan partai politik: PKPB, Partai Gerindra, PBB, Partai Hanura, Partai Barnas, PPDI, PDK, dan PDS.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten Gunungkidul tahun 2010 yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul, pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos memperoleh suara terbanyak dengan jumlah

146.849 suara atau 36,03%. Di urutan kedua, diduduki pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I dengan memperoleh 129.841 suara atau 31,86%. Disusul pasangan H. Sutrisno, SE–Slamet, S.Pd, MM yang memperoleh 119.778 suara atau 29,39%, dan pasangan H. Yanto, SH–Ngadiyono dengan memperoleh 11.103 suara atau 2,72%. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 407.571 suara atau 97,35% dan jumlah perolehan suara tidak sah sebesar 11.061 suara atau 2,65%.

Pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos unggul di delapan kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Gunungkidul. Sedangkan pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I dan H. Sutrisno, SE–Slamet, S.Pd, MM masing-masing unggul di lima kecamatan. Kemudian untuk pasangan H. Yanto, SH–Ngadiyono kalah di semua kecamatan yang ada di Gunungkidul (Data KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010).

Pemilukada langsung untuk yang kedua kalinya ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat Gunungkidul. Hal ini dibuktikan dengan animo masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, meskipun juga terdapat masyarakat yang enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada tersebut. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 418.632 pemilih atau 71,87%, artinya terdapat angka

golput sebesar 28,13%. Sebenarnya angka golput ini cukup tinggi, karena sejumlah 163.876 pemilih dari 582.508 pemilih yang ada di daftar pemilih tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada.

Fenomena golput ini juga yang terjadi di berbagai pemilukada di Indonesia. Angka golput yang cukup tinggi di beberapa pemilukada tersebut menunjukkan bahwa saat ini masyarakat semakin apatis terhadap “pesta demokrasi” untuk memilih pemimpin daerah. Pada kenyataannya, trilyunan rupiah telah dikucurkan untuk beberapa acara pemilukada, namun pemimpin yang terpilih tidak mampu mewujudkan perbaikan tingkat kehidupan masyarakat. Perbaikan tingkat kehidupan itu justru hanya terbatas pada pemimpin dan keluarganya, serta partai-partai yang menjadi pendukungnya saat pemilukada dilaksanakan.

Beberapa lembaga survei nasional menunjukkan penyebab lain fenomena golput ini, yaitu bahwa kondisi partai politik saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan partai politik lebih identik dengan kuda tunggangan yang komersial, dan siap direntalkan kepada siapa saja yang ingin berkuasa. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa setiap orang yang memiliki keinginan untuk berkuasa melalui jalur pemilukada harus mengeluarkan ratusan juta bahkan milyaran rupiah untuk menyewa partai politik. Imbalan yang

diberikan kepada partai bisa diberikan tidak hanya dalam bentuk tunai, tetapi bisa juga berupa komitmen pemberian sesuatu (dalam bentuk lain) yang tidak kalah tinggi nilai ekonomisnya apabila mereka berhasil menduduki kursi kekuasaan.

Pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh 418.632 pemilih terdaftar yang tersebar dalam 1.885 tempat pemungutan suara (TPS) tersebut telah memunculkan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2010-2015. Pasangan yang dalam kampanyenya memiliki jargon “*Ndeso Makmur Gunungkidul Makmur*” sepertinya memang membawa angin segar di tengah kebutuhan masyarakat akan perlunya perbaikan tingkat ekonomi sebagai tuntutan yang mendesak menuju era perdagangan bebas. Berdasarkan data pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai pada tahun 2011, jumlah angkatan kerja adalah sebanyak 356.160 orang. Sedangkan jumlah penganggur terbuka pada tahun yang sama adalah sebesar 12.214 orang, kini tengah menantikan realisasi serta kiprah dari pemimpin barunya. Dengan adanya pemimpin baru ini, diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil, menengah dan industri lokal yang bisa menjadi motor penggerak bagi sektor lainnya, seperti sektor perdagangan, keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Oleh karena itu, bukan hanya

pembangunan atau pertumbuhan perekonomian saja yang dikedepankan, melainkan perlu juga diimbangi dengan pemerataan yang adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini nantinya pasti akan mendukung pula tingkat perbaikan pendidikan serta kesehatan masyarakat yang selama ini memang masih menjadi masalah besar bukan hanya bagi wilayah di Gunungkidul, namun juga di Indonesia.

b. Deskripsi Strategi Komunikasi Politik PAN dalam Memenangkan Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Komunikasi politik memiliki peran yang vital dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, seperti halnya pada sistem politik maupun kegiatan politik yang lainnya. Harold D. Laswell, seorang ahli ilmu politik Amerika Serikat pada tahun 1948 mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Laswell menyampaikan bahwa proses komunikasi dapat dipahami dengan lima pertanyaan, yaitu: *who* (siapa sumbernya), *says what* (apa yang disampaikan), *in which channel* (melalui media apa), *to whom* (siapa sasaran), *with what effect* (apa pengaruhnya). Pada akhirnya, teori ini juga dipahami dalam konteks komunikasi politik sebagai teori komunikasi politik.

Dalam rangka memenangkan suatu kompetisi dalam pemilihan umum, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya beberapa strategi kemenangan, salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi

politik. Beberapa bulan sebelum tanggal 23 Mei 2010 yang ditetapkan sebagai hari pencoblosan tiba, bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah telah aktif melakukan lobi, negosiasi, dan beragam upaya lain yang mengarah pada terkumpulnya dukungan bagi pencalonan mereka. Selain bakal calon, partai-partai yang bersaing baik sebagai partai pengusung maupun partai pendukung juga aktif melakukan komunikasi politik untuk memperoleh kemenangan dan stabilitas politik *pasca* pemilukada.

1) **Komunikasi Politik Internal Pengusung**

Surat Keputusan (SK) Nomor: PAN/12/Kpts/K-S/10/XII/2009 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Periode 2010–2015 dari Partai Amanat Nasional yang diberikan DPW PAN DIY tidak lantas memuluskan segala hal yang berkaitan dengan pemilukada dari kubu PAN sendiri. Hal ini didasari karena dukungan internal PAN Gunungkidul terhadap pasangan Sumpeno–Badingah sendiri belum bulat, meski DPW PAN telah mengetuk palu. Belum bulatnya dukungan internal partai ini disebabkan sebagian besar orang di internal PAN Gunungkidul masih menjadi pendukung H. Suharto, SH (bupati *incumbent* yang pada Pemilukada Gunungkidul tahun 2005 diusung oleh PAN). Selain itu dikarenakan masih banyak orang di internal PAN sendiri yang memiliki loyalitas kepada H. Suharto, SH., meskipun ia mencalonkan diri lewat partai lain.

Akhirnya pasangan Sumpeno–Badingah pun berusaha meyakinkan pengurus maupun kader PAN Gunungkidul bahwa SK DPW adalah SK partai yang harus dipatuhi dan dilaksanakan kebijakannya, agar masalah tidak berlarut-larut. Pasangan ini kemudian melakukan komunikasi politik dengan pengurus PAN dari tingkat daerah sampai ranting. Pasangan ini tidak menginginkan adanya perpecahan suara di dalam internal partai, yang nantinya justru bisa menjadi penghalang dalam meraih kemenangan dalam pemilukada. Kemudian masalah yang ada tersebut segera dibenahi dengan melakukan lobi politik dan pencitraan kepada internal partai. Meskipun Sumpeno merupakan politisi baru yang terjun ke panggung politik Gunungkidul, tetapi *track record* yang dimilikinya bisa diandalkan oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Sutata:

“Proses penentuan Sumpeno Putro sebagai calon kepala daerah yang diusung PAN ini sebenarnya menyebabkan terjadinya demokrasi di internal partai sendiri. Dalam tubuh partai terjadi pro-kontra dalam penentuan calon kepala daerah ini, sehingga diadakanlah *voting*. Sumpeno Putro mendapatkan kurang lebih 75 suara, Suharto mendapatkan kurang lebih 56 suara, sedangkan Dalil Suhadi tidak mendapatkan suara. Jika dilihat dari penilaian kualitatif saat proses seleksi itu pun Sumpeno Putro telah mengungguli dua calon yang lain. Kebanyakan anggota partai tidak memilih Suharto lagi sebagai calon kepala daerah karena Suharto dinilai kurang memiliki komitmen terhadap partai dan ada indikasi sudah melirik partai lain juga. Kemudian Pak Sumpeno memang mempunyai akses komunikasi di pemerintah pusat, sehingga diharapkan oleh PAN dan masyarakat dapat membawa perubahan terhadap Gunungkidul. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan tersebut maka diputuskan untuk mengusung Sumpeno Putro sebagai calon kepala daerah dalam Pemilukada Gunungkidul tahun 2010”.

Cara lain yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan komunikasi kepada ormas Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul. Tidak dapat dipungkiri meski secara *de jure* tidak ada hubungan subordinatif antara PAN dengan Muhammadiyah, tetapi kedekatan Muhammadiyah dengan PAN tetap tidak dapat ditutupi. Hal ini tidak lain dikarenakan sejarah telah mencatat bahwa pendiri PAN ada mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pencitraan dan komunikasi politik lanjutan pasangan ini diarahkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dari semua unsur. Posisi Hj. Badingah, S.Sos yang pernah menjadi penasehat 'Aisyiyah juga digunakan untuk meyakinkan ormas ini agar memberikan dukungan. Hal ini disampaikan oleh H. M. Dodi Wijaya, SH.,ST dalam pernyataannya:

“... Selain itu Bu Badingah juga dekat dengan Muhammadiyah, aktif di organisasi 'Aisyiyah juga cukup lama. PAN juga memandang bahwa prosentase pemilih perempuan lebih banyak daripada yang laki-laki. Sehingga strategi PAN itu bagaimana kalau disandingkan dengan Pak Peno, yang akan menjadi kekuatan besar....”

Kegiatan yang dilakukan oleh pasangan Sumpeno–Badingah tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari proses lobi politik yang bersifat dialogis. Sehingga hasil yang diharapkan dari lobi politik itu adalah adanya kesepakatan dan kesepakatan bersama yang nantinya akan diperkuat melalui pembicaraan formal dalam rapat atau sidang politik yang akan menghasilkan keputusan dan sikap politik tertentu. Dalam hal ini, akhirnya Sumpeno–Badingah

mampu meyakinkan kader PAN dan Muhammadiyah di Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan dukungan suara kepada mereka.

2) Pembentukan Tim Sukses

Selain melakukan komunikasi politik dengan internal partai, pasangan Sumpeno-Badingah juga harus memikirkan bagaimana cara merebut simpati masyarakat Gunungkidul dalam pemilukada. Dalam hal ini, tentunya mereka dibantu oleh tim sukses untuk memenangkan Pemilukada Gunungkidul tahun 2010. Bersama tim sukses ini, pesan-pesan politik yang mereka bawa disampaikan ke seluruh penjuru Kabupaten Gunungkidul.

Pembentukan tim sukses dilakukan untuk sosialisasi dan konsolidasi di semua level gerakan. Pembentukan tim dimulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat ranting. Tim kampanye dan pemenangan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos dibentuk pada tanggal 13 Januari 2010. Berdasarkan SK DPD PAN Gunungkidul Nomor: PAN/12.02/Kpts/K-S/016/I/2010 tentang Susunan Tim Kampanye dan Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Periode 2010–2015 dari PAN Gunungkidul, susunan tim kampanye dan pemenangannya terdiri dari penanggung jawab, penasehat, ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, beberapa departemen (humas, isu dan propaganda; logistik; sosialisasi, kampanye dan

mobilisasi massa; hukum dan advokasi; saksi dan pelaporan; serta juru kampanye), dan koordinator di setiap kecamatan.

Tim sukses yang dikerahkan pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 ini tidak hanya berasal dari anggota struktural PAN saja, tetapi juga berasal dari orang-orang di luar struktural partai. Setidaknya ada dua jalur tim sukses yang bekerja secara terorganisasi dan terkoordinir dengan baik, yaitu tim resmi dan tim-tim relawan. Pembentukan tim kampanye Sumpeno Putro–Badingah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara tim calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan partai, yang ada di bawah satu koordinator. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh H. Heri Kriswanto, S.Ag:

“Pembentukan tim kampanye Sumpeno Putro–Badingah pada waktu itu dibagi menjadi beberapa tim, diantaranya dengan pembentukan tim kampanye resmi serta tim-tim relawan. Tim kampanye resminya dibentuk dari orang-orang partai, kalau yang relawan itu di luar orang-orang partai dengan jargonnya “SB-Makmur, ndesone makmur, Gunungkidul makmur.” Kemudian pada waktu itu adapula partai pendukung calon yaitu PKS, yang ikut bergabung setelah kami mendaftarkan diri ke KPUD”.

Tim resmi berasal dari partai, dengan mengacu ke struktural PAN sendiri dan dibentuk oleh partai. Kemudian untuk tim relawan berasal dari luar struktur partai, yang merupakan dukungan dari massa luar seperti Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG), kelompok angkutan (*Bolo Rodo*), relawan SB-Makmur, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Selain itu juga didukung oleh PKS yang ikut bergabung

dengan PAN setelah PAN mengadakan deklarasi calon yang akan diusung dalam Pemiluada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.

Seperti yang dikemukakan oleh H. M. Dodi Wijaya, SH.,ST:

“Pembentukan tim kampanyenya tidak hanya yang berasal dari partai saja. Di luar struktur partai pun ada tim kampanyenya, seperti tokoh masyarakat, relawan SB-Makmur, Bolo Rodo, dll. Pada waktu itu juga didukung PKS, meskipun PKS baru ikut mendukung PAN setelah kami mengadakan deklarasi calon yang akan diusung”.

Pada dasarnya pembagian tim kampanye tersebut sudah ada proporsinya masing-masing, agar bisa saling melengkapi. Masing-masing tim bekerja dengan sistem pembagian wilayah dan pembagian sasaran kampanye sehingga kemungkinan terjadi benturan bisa diminimalkan. Masing-masing tim sukses mendapat bagian tersendiri dalam kerja-kerja yang terintegrasi di bawah komando pusat, baik dari pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, dari partai pengusung (PAN) dan partai pendukung (PKS), atau relawan-relawan yang mendukung pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos.

Tim yang telah terbentuk itu memusatkan koordinasinya di Sekretariat Bersama (Sekber) Sumpeno–Badingah, yang berada di Ledoksari untuk melakukan rapat-rapat. Selain bertujuan sebagai wadah monitoring dan evaluasi, koordinasi tersebut juga berfungsi untuk mengkonsep dan merencanakan detail teknis mengenai strategi pemenangan yang akan dilakukan esok hari dan *action* atau kampanye yang akan dilakukan.

3) Koordinasi dan Sosialisasi ala DPD PAN Kabupaten Gunungkidul

Setelah tim sukses selesai dibentuk, maka agenda partai selanjutnya adalah mendeklarasikan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro–Hj. Badingah, S.Sos. Selanjutnya tim kampanye dan pemenangan mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 21 Januari 2010 untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam pemenangan pasangan tersebut. Hasil rapat mengamanatkan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi ke seluruh jajaran elemen partai baik di tingkat ranting dan cabang, koordinasi dan sosialisasi di seluruh jajaran pengurus DPRt PAN se-Gunungkidul di DPC PAN se-Gunungkidul.

Road Show koordinasi dan sosialisasi ke seluruh jajaran elemen partai dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010. Hingga tanggal 31 Januari 2010 baru terlaksana 16 DPC PAN se-Gunungkidul, sedangkan dua DPC dapat melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi yaitu DPC PAN Ponjong dan DPC PAN Semanu baru pada bulan Februari 2010. Selanjutnya pasca *Road Show* tersebut, tim kampanye serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi untuk menentukan langkah-langkah pemenangan selanjutnya. Selain itu tim maupun calon telah melakukan sosialisasi yang rata-rata sehari 5–10 tempat, dan sebagai bagian dari tertib manajemen agar terjadi

sinkronisasi dalam sosialisasi diputuskan bahwa ada “Gerakan Semarak Sosialisasi” di Padukuhan se-Gunungkidul, dan menetapkan satu pintu penjadwalan di Sekretariat Pemenangan di DPD PAN Gunungkidul.

Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini memiliki sisi politis yaitu ketika sejumlah massa berkumpul, maka kesan masyarakat mulai terbangun bahwa kandidat yang bersangkutan populer, tim solid, dan dukungan massa *riil*. Karena pada dasarnya kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini berfungsi mensolidkan tim agar mampu membakar semangat mereka, sehingga pada akhirnya mau bergerak mendukung Sumpeno–Badingah. Di samping juga berfungsi sebagai pengenalan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat.

4) Kampanye Politik PAN Gunungkidul

Kampanye merupakan salah satu agenda pemilukada yang harus dilalui dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua kandidat peserta pemilukada. Kampanye dilakukan dalam rangka sosialisasi, penggalangan massa pendukung maupun untuk meningkatkan soliditas tim. Pada dasarnya kampanye dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye pasangan calon dengan menawarkan visi dan misi atau program pasangan secara lisan atau tertulis kepada masyarakat, untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. Perencanaan kampanye yang tidak

maksimal akan berpengaruh terhadap pemilih, tim sukses, dan citra kandidat itu sendiri.

KPUD Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara dalam Pemiluakada Gunungkidul 2010, membagi jadwal kampanye pasangan calon kepala daerah selama 14 hari terhitung sejak tanggal 06 Mei s/d 19 Mei 2010. Namun dalam pelaksanaannya, jadwal yang telah ditentukan tidak semua dimanfaatkan oleh pasangan calon atau tim kampanyenya, karena ada yang lebih memilih dengan pertemuan terbatas di sore atau malam hari.

**Tabel 8. Pembagian Jadwal Kampanye
Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010**

No.	Kecamatan	BULAN MEI													
		TANGGAL													
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Semanu		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
2.	Wonosari		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
3.	Playen		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
4.	Patuk		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
5.	Ngawen		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
6.	Nglipar		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
7.	Gedangsari		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
8.	Semin		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
9.	Karangmojo		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
10.	Ponjong		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
11.	Rongkop		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
12.	Girisubo		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
13.	Tepus		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
14.	Tanjungsari		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
15.	Paliyan		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
16.	Saptosari		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
17.	Panggung		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4
18.	Purwosari		3	2	1	4	3	2		1	4	3	2	1	4

(Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010)

Secara formal, KPUD memberikan waktu kampanye selama dua minggu. PAN sebagai sebuah partai pengusung melakukan proses lengkap dari konsolidasi internal partai sampai masa kampanye kurang lebih lima bulan (Januari 2010–Mei 2010). Namun ketika hiruk-pikuk pemilukada mulai terdengar, sudah ada beberapa calon yang menghembuskan isu-isu politik dan program yang terkait diri calon itu.

Sejak dari jauh-jauh hari PAN telah mulai melancarkan strategi kampanye yang bertujuan untuk mensosialisasikan calon dan menggalang dukungan massa sebanyak-banyaknya. Konsep kampanye PAN lebih bersifat dialogis, artinya kampanye secara tatap muka. Kampanye secara tatap muka, yaitu agenda turun ke pasar dan temu warga dinilai paling laku dijual dan merupakan pendekatan yang paling baik. Seperti yang dikemukakan oleh Amri Dwi Suahya, S.Si:

“Kampanye yang dilakukan biasa, seperti melakukan temu warga secara rutin yang sudah berjalan sebelum kampanye resmi dilakukan. Kemudian lewat media, seperti koran, TV, dan pemasangan baliho di tempat strategis. Selain itu ada pendekatan ke pedagang pasar setiap pagi atau agenda turun pasar selama kurang lebih 1 bulan. Pendekatan ke pedagang pasar dan temu warga ini paling laku dijual dan merupakan pendekatan paling baik”.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti karakteristik pemilih, letak geografis lokasi kampanye, dan faktor budaya masyarakat setempat, kegiatan kampanye dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dianggap paling bisa

mempengaruhi massa pemilih. Selain itu metode-metode yang dipilih harus efektif, efisien, dan dengan biaya seminimal mungkin (hemat). Hal ini dikarenakan mengingat sumber pendanaan kampanye dalam pemilu yang terbatas. Dengan demikian kegiatan kampanye dilaksanakan dengan cara:

- a) Agenda temu warga (Program 1000 Padukuhan).
- b) Pertemuan-pertemuan terbatas di antara pengurus internal partai.
- c) Rapat umum.
- d) Agenda turun ke pasar (Garebeg Pasar).
- e) Pemasangan gambar atau alat peraga lain.
- f) Aksi-aksi sosial, seperti aksi *fogging* (pengasapan) dari IKG.

Secara umum pelaksanaan kampanye berjalan lancar tanpa hambatan yang besar, dan semua unsur yang ada dapat mendukung pasangan Sumpeno–Badingah. Artinya, terdapat hambatan-hambatan yang bersifat teknis saja. Meskipun memang terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh tim selama masa kampanye, antara lain:

- a) Jadwal yang terlalu padat, sedangkan anggaran yang dimiliki terbatas.
- b) Keterbatasan jumlah tim kampanye atau kekurangan juru kampanye.

- c) Pemikiran tentang strategi pemenangan yang sangat variatif dan cukup sulit disatukan, menyebabkan PAN harus mengakomodir lagi.
- d) Keaktifan dan motivasi kader untuk memenangkan pasangan calon yang diusung PAN tidak tinggi, acuh, kurang peduli, kemudian ada yang peduli tapi keliru dalam mengambil langkah.
- e) Ada pasangan calon dari partai lain yang melakukan kampanye negatif atau semacam *black campaign* dengan memperlihatkan kelemahan-kelemahan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung PAN.

Saat proses kampanye berjalan, tentunya peran juru kampanye (jurkam) menjadi sangat vital. Juru kampanye adalah kekuatan pokok untuk mendapatkan argumentasi publik, yakni usaha menggiring massa dalam bentuk ajakan, saran, dan arahan bagi masyarakat. Juru kampanye juga memiliki tugas untuk melakukan bantahan, sanggahan, debat, dan menyebarkan kontra isu untuk menangkal isu miring mengenai bakal calon yang diusung.

5) Saksi dan Masa Pemungutan Suara

Saksi adalah seorang kader partai yang bertugas memantau, mengawasi, dan melaporkan proses pemungutan dan penghitungan suara. Seorang saksi haruslah merupakan kader partai politik, bukan

asal ditunjuk untuk menjadi saksi. Hal ini mengingat sikap seseorang akan dipengaruhi sentimen psikologis latar belakang politik dirinya.

Idealnya sebuah partai mampu menempatkan paling sedikit seorang saksi yang dapat dipercaya di setiap TPS. Hal ini sangat menguntungkan bagi partai bisa memiliki hasil perhitungan suara secara utuh di seluruh daerah, yang kemudian hasilnya bisa dijadikan bahan perbandingan dengan hasil pemungutan suara secara resmi. Tetapi tentunya hal ini sulit dilaksanakan, karena dibutuhkan personil yang sangat besar jumlahnya. Sehingga diperlukan suatu rancangan program untuk merekrut saksi, agar efektif dan memberikan hasil yang paling menguntungkan.

Saksi menjadi kunci dalam hal kecurangan, pelanggaran, dan kontrol terhadap proses pemilukada. Tanpa saksi, kasus kecurangan dan pelanggaran akan sulit diproses secara hukum. Di samping pengawasan proses politik mutlak terus dilakukan, saksi sangat menentukan kelancaran proses formal pemilukada.

Puncak pelaksanaan pemilukada adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Tahap ini adalah tahap yang paling menentukan karena benar-benar melibatkan seluruh aparat penyelenggara pemilukada, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta masyarakat pemilih. Berdasarkan data yang ditetapkan KPUD Gunungkidul, hari dan tanggal pemungutan suara jatuh pada hari Minggu, 23 Mei 2010.

Masyarakat Gunungkidul secara antusias mengikuti gelaran akbar lima tahunan ini. Hal ini terbukti dari data KPUD yang menyebutkan bahwa terdapat 418.632 warga yang memberikan suaranya, meskipun 11.061 diantaranya dinyatakan tidak sah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat bahwa dari total DPT yang dikeluarkan KPUD, yaitu sebanyak 582.508 orang, ada sebanyak 163.876 orang yang tidak memberikan suaranya.

**Tabel 9. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	H. Suharto, SH – H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I.	129.841	31.86%
2.	H. Sutrisno, SE – Slamet, S.Pd, MM.	119.778	29.39%
3.	Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M. Sc – Hj. Badingah, S.Sos.	146.849	36.03%
4.	H. Yanto, SH – Ngadiyono	11.103	2.72%
Jumlah Suara Sah		407,571	100 %

(Sumber: KPUD Kabupaten Gunungkidul 2010)

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 menghasilkan pasangan Sumpeno Putro–Badingah sebagai pemenang dengan memperoleh 146.849 suara atau sebesar 36,03%. Sehingga pasangan tersebut berhak menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul periode 2010–2015. Sedangkan pasangan Suharto–Arief Gunadi hanya berada di urutan kedua dengan memperoleh 129.841 suara atau sebesar 31,86%.

Disusul pasangan Sutrisno–Slamet di urutan ketiga dengan memperoleh 119.778 suara atau 29,39%. Di urutan terbawah adalah pasangan Yanto–Ngadiyono yang memperoleh 11.103 suara atau 2,72%. Jumlah keseluruhan perolehan suara sah pada Pemilu kabupatèn Gunungkidul tahun 2010 adalah 407.571 suara.

2. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Komunikasi Politik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PAN

a. Deskripsi Kinerja Mesin Partai

PAN sebagai sebuah partai yang menggunakan berbagai strategi dalam rangka memenangkan Pemilu kabupatèn Gunungkidul 2010, mampu maju dalam pemilu kabupatèn dengan kesiapan strukturnya. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan berada di tangan pasangan Sumpeno–Badingah yang diusung oleh PAN dan didukung oleh PKS. Dalam pemilu kabupatèn ini pasangan calon nomor urut 3 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos memperoleh jumlah suara terbesar dengan perolehan suara 146.849 atau 36,03%.

PAN berperan total mulai dari persiapan sampai pelaksanaan pemilu kabupatèn. PAN membuat jaringan kader dari kabupatèn sampai tingkat ranting. Dengan strategi tersebut, PAN berusaha mengefektifkan mesin partai beserta kader-kader yang dimiliki. Setiap tahapan proses yang dilakukan PAN berdasarkan konsep yang matang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Kemudian langkah yang dilakukan PAN setelah mendapatkan keputusan bakal calon yang akan diusung ialah mulai mencitrakan figur yang diusungnya. Pada dasarnya Sumpeno bukan kader struktural Muhammadiyah, sehingga untuk mencitrakan dirinya adalah tokoh religius juga tidak otomatis. Untuk mencitrakan sebagai tokoh religius, PAN mensosialisasikan pasangan calon kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Selain kedua hal yang telah disebutkan di atas, PAN memilih untuk menggunakan jargon “*Ndeso* Makmur Gunungkidul Makmur” dalam kampanyenya dan mengusung visi “terwujudnya Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera”. Jargon dan visi tersebut selalu disosialisasikan PAN kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti dengan mengadakan kegiatan temu warga (Program 1000 Padukuhan), agenda turun ke pasar (Garebeg Pasar), pertemuan-pertemuan terbatas di antara pengurus internal partai, rapat umum, pemasangan gambar atau alat peraga lain, dan aksi sosial.

PAN juga melakukan optimalisasi saksi pada hari pencoblosan. Menjelang hari pencoblosan, tim sukses telah dapat memastikan bahwa seluruh calon saksi sudah dibekali dengan logistik maupun materi sosialisasi pasangan Sumpeno–Badingah. Tim sukses mengambil kebijakan bahwa setiap TPS akan dikawal oleh 2 (dua) orang saksi.

Totalitas peran PAN sejak dimulainya proses rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil daerah hingga hari pemungutan suara tiba

sebagai partai pengusung sangat berpengaruh. Sehingga unsur partai pengusung (ditambah partai pendukung) dan pasangan calon merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan sifatnya yang diharapkan dapat saling melengkapi demi mencapai tujuan bersama.

b. Deskripsi Pengaruh Jaringan Muhammadiyah

Muhammadiyah secara *de jure* tidak mempunyai hubungan subordinatif dengan PAN, tetapi tidak dipungkiri bahwa kedekatan Muhammadiyah dengan PAN tetap tidak dapat ditutupi. Hal ini tidak lain dikarenakan sejarah telah mencatat bahwa pendiri PAN ada mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain itu, PAN di Gunungkidul dibidani oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gunungkidul. PAN di Gunungkidul oleh PDM diserahkan kepada 11 orang yang pada akhirnya disebut panitia sebelas penyusunan pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul, hingga terbentuklah Pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul.

Muhammadiyah memiliki massa yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai organisasi keagamaan tentunya Muhammadiyah tidak dapat melakukan upaya politik praktis, namun dengan banyaknya jumlah massa Muhammadiyah diharapkan dapat ikut menitipkan kebijakannya apabila berpartisipasi dalam mendukung bakal calon kepala daerah. Sehingga posisi Hj. Badingah, S.Sos yang pernah menjadi penasehat 'Aisyiyah juga digunakan untuk melakukan pencitraan dan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah

dari semua unsur agar menjadi yakin dalam memberikan dukungan suaranya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arif Setiadi, S.IP:

“Ya, perolehan suaranya ada pengaruh jaringan Muhammadiyah juga. Tidak ada keputusan yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon dari PAN, tetapi secara kultural *person-person* ada kedekatan, maka menjadi salah satu sumber suara untuk kemenangan”.

c. Deskripsi Pengaruh Jaringan IKG

IKG didirikan pada tanggal 12 Desember 1970 oleh sekelompok sesepuh dan putra daerah asli Gunungkidul dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kepedulian yang sama untuk memajukan daerah demi tercipta Gunungkidul yang makmur yang diharapkan berujung pada masyarakat yang sejahtera. Mereka yang terlibat dalam pendirian IKG adalah: H. Sukandi, SH., Rasido., Drs. S. Wardjono., Sudardjo., Drs. R. Sunarto, Imam Supardi, Sadjiman, Slamet D., Drs. Magijo, Mardjasim, Gitominarso, Sumardjo HS., Poerwodisastro, Kandari, Kirjono, Soegiman, Mardjono, Tjiptowardojo. Sebagai wadah berkumpul bagi masyarakat Gunungkidul yang ada di Jakarta dan sekitarnya, IKG diharapkan dapat dijadikan sebagai organisasi primordial yang mampu menjadi perekat bagi semua komponen masyarakat Gunungkidul dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, kepercayaan, dan lain-lain.

IKG memiliki visi: “Membangun komunitas organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial, dalam rangka menuju masyarakat Gunungkidul yang bersatu, makmur, adil, dan sejahtera”. Kemudian misi IKG adalah: “Mewujudkan iklim

Gunungkidul yang kondusif bagi terciptanya masyarakat yang sejahtera, cerdas, kreatif, dan kompetitif yang berbasis pada pengetahuan” (Tim Redaksi Website IKG, 2013).

PAN juga bekerja sama dengan IKG dalam Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Kerja sama yang dilakukan antara lain dengan cara mendatangkan perantauan agar pulang, memilih dan mengajak masyarakat sekitarnya memilih pasangan Sumpeno–Badingah. Selain itu IKG juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk mendekati masyarakat, misalnya dengan melakukan aksi *fogging* (pengasapan) di beberapa tempat. Setelah aksi *fogging* dilakukan, tim sukses membagi-bagikan dan menempelkan *sticker* bergambar pasangan Sumpeno Putro–Badingah kepada warga. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam rangka mengenalkan pasangan yang diusung PAN kepada warga masyarakat di Gunungkidul.

d. Deskripsi Pengaruh Figur Politik

Faktor figur politik yang diusulkan dalam bursa pemilihan kepala daerah di wilayah dan tingkatan manapun, akan mempunyai pengaruh dalam perolehan suara seorang pasangan calon. Hal ini dikarenakan bahwa tidak dapat dipungkiri jika masyarakat dalam memilih pemimpin eksekutif, pasti melihat dan memperhatikan sosok dan pencitraan calon yang maju dalam pemilihan umum tersebut. Meskipun demikian, seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat mencalonkan diri apabila telah memiliki kendaraan politik, yaitu partai politik. Dan

untuk menjadi pengusung pasangan calon kepala daerah, sebuah partai politik harus memenuhi syarat sebagai pengusung pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan.

PAN sebagai partai pengusung sangat memperhatikan figur pasangan calon yang akan diusungnya. Oleh karena itu PAN memiliki mekanisme sendiri dalam rekrutmen, seleksi, dan penentuan pasangan calon yang akan diusung. PAN juga memperhatikan banyak faktor, baik internal maupun eksternal untuk dapat menentukan figur elit politik yang benar-benar sesuai dengan kriteria partai. Ketokohan ini nantinya akan sangat penting, mengingat PAN juga harus mempertimbangkan apakah figur tersebut “layak dijual” atau tidak. Maka ketika PAN memutuskan untuk mengusung Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dan Hj. Badingah, S.Sos., tentunya banyak pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan keduanya yang diharapkan dapat saling melengkapi.

Berikut ini sekilas profil pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro–Hj. Badingah, S.Sos yang diusung PAN pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010:

1) Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc.

Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dilahirkan pada tanggal 23 November 1947 di Sanggrahan, Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul. Sumpeno merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Manguntaruno bin Amad Idris dengan ibu Sumi binti Karsoredjo.

Sumpeno menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya, Ponjong. Setelah dirinya menamatkan sekolah dasar di Sekolah Rakyat (SR) Negeri Umbulrejo Ponjong pada tahun 1960, ia pun melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ponjong dan lulus tahun 1963. Selanjutnya babak baru kehidupannya dimulai ketika ia memutuskan untuk melanjutkan ke SMA II IKIP Yogyakarta, yang artinya bahwa pada waktu itu Sumpeno harus kost di Kota Yogyakarta dengan jarak tak kurang dari 40 km dari rumahnya.

Setelah lulus SMA pada tahun 1966, ia melanjutkan kuliah di Universitas Gajah Mada pada Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian dan dinyatakan lulus tahun 1972. Pada tahun 1974 Sumpeno mengawali karir PNS-nya sebagai petugas BIMAS padi di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kemudian menjadi pengawas BIMAS padi di Kabupaten Tegal. Untuk meningkatkan kapasitasnya, Sumpeno melanjutkan studi dan akhirnya mendapatkan gelar *Master of Science* dari *Central Institute of Fisheries Education*, Bombay, India tahun pada tahun 1976. Dilanjutkan dengan gelar *Doctor of Philosophy* dari *Institute of Food Science and Technology, College of Fisheries, University of Washington, Seattle, USA* tahun 1982.

Selain berprofesi sebagai PNS, Sumpeno juga berprofesi sebagai tenaga pengajar (dosen) di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti dosen Fakultas Pertanian UGM, dosen Fakultas Perikanan

IPB, dan dosen Fakultas *Life Science, Swiss Germany University*. Karir Sumpeno semakin melejit, ketika pada tahun 1994 dirinya diangkat sebagai Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi Badan Agribisnis Departemen Pertanian RI. Pada 1996 diangkat sebagai Atase Pertanian pada Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa yang bermarkas di Brussel, Belgia. Pada tahun 2001 dirinya mendapat kepercayaan sebagai Staf Ahli Kepala BULOG sekaligus diangkat sebagai Direktur Jendral Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan RI sampai tahun 2005.

Selain prestasi dalam karir ke-PNS-annya, Sumpeno juga memiliki segudang pengalaman organisasi, antara lain:

- a) Ketua PERMIAS (Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS) Seattle Washington pada tahun 1982.
- b) Ketua Komisi ISO Indonesia.
- c) Ketua Bidang Riset dan Teknologi Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI).
- d) Wakil Ketua Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia.
- e) Wakil Ketua Indonesia–Belgium *Biotechnology Consortium*.

2) **Hj. Badingah, S.Sos**

Hj. Badingah, S.Sos lahir di Gunungkidul pada tanggal 17 September 1949, dari pasangan Hadi Utomo dan Hj. Saginah HU.

Hj. Ia merupakan istri dari almarhum H. M. Wasito Donosaroyo, mantan Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul (2002).

Badingah menyelesaikan sekolah dasar di Sekolah Rakyat (SR) Negeri 6 dan lulus pada tahun 1962. Setelah itu ia melanjutkan ke SMP Negeri Wonosari Gunungkidul dan lulus pada tahun 1965. Setamat SMP, Badingah melanjutkan lagi pendidikannya di SMA Negeri 1 Wonosari dan lulus pada tahun 1968. Selanjutnya, ia memilih untuk menjadi pengusaha dengan memiliki Unit Dagang (UD) Candi Putra Grup. UD. Candi Putra Grup ini memiliki lima bagian, yaitu: Candi Putra Optik, CEPE Musik, Candi Putra Elektronik dan Meubel, Apotek Farmasi, dan Apotek Anindita.

Jauh sebelum keterlibatannya secara langsung di dunia politik, Badingah telah aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. Seperti yang ia lakukan pada selang 1999–2004 sebagai Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) sekaligus Ketua Kelompok Pengajian “SABIILIL HUDAA” Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun yang sama, Badingah dipercaya sebagai Wakil Ketua II Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan Badingah yang lain adalah menjadi penasehat ‘Aisyiyah Kabupaten Gunungkidul sejak 2001–2006. Ia pun menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gunungkidul pada Biro Pemberdayaan Wanita, Remaja dan Keluarga pada tahun

2002–2005. Tahun 2002–2007, ia menjadi Ketua Ikatan Wanita Pengusaha (IWAPI) Tingkat II Kabupaten Gunung Kidul dan menjadi anggota Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kabupaten Gunungkidul Bagian Promosi dan Pemasaran. Ia juga menjadi pengurus Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (PERWOSI), dan masih ada lebih banyak lagi organisasi yang pernah diikuti oleh Badingah.

Kemudian untuk menambah kapasitasnya, Badingah mengambil kuliah pada Jurusan Sosiologi di STISIPOL Kartika Bangsa Yogyakarta. Ia mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada tahun 2003. Pada tahun 2005, Badingah menjadi calon wakil kepala daerah berpasangan dengan H. Suharto, SH. yang diusung oleh PAN. Pasangan ini mampu memenangkan pemilukada dalam satu kali putaran.

Visi pasangan Sumpeno–Badingah adalah “terwujudnya Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera”. Sedangkan misi pasangan ini antara lain:

- 1) Mewujudkan air sebagai sumber kemakmuran dengan motto “*Ndeso Makmur Gunungkidul Makmur*”.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan pendidikan untuk kesejahteraan.
- 3) Meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan industri pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta sektor industri pariwisata untuk melestarikan nilai-nilai sosial dan budaya.
- 4) Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi, jalan desa, kecamatan maupun antar kabupaten sebagai urat nadi ekonomi.
- 5) Mewujudkan pelabuhan perikanan nusantara dan fasilitas bandara untuk meningkatkan akses regional dan internasional.

Rekam jejak, prestasi, dan pengalaman yang dimiliki pasangan Sumpeno–Badingah tentunya mempunyai nilai jual yang bagus kepada masyarakat Gunungkidul. Ditopang lagi dengan visi dan misi yang mereka bawa dalam Pilkada Gunungkidul tahun 2010, merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Gunungkidul yang mengidamkan perbaikan kondisi yang ada di masa depan.

C. Pembahasan

Pilkada merupakan perwujudan sistem pemilihan langsung yang mulai berhembus sejak adanya era reformasi, yang muncul di Indonesia sejak tahun 1998. Pilkada Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 merupakan hajatan demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Gunungkidul, yang dilakukan untuk kedua kalinya dalam sejarah masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Pilkada yang dilaksanakan pada 23 Mei 2010 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini terbukti dengan tidak adanya sengketa hasil pemilu yang muncul setelah ditetapkannya Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk masa jabatan 2010–2015. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pilkada dinilai sudah demokratis dan mewakili keinginan rakyat Gunungkidul.

Pilkada Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010 ini diikuti oleh 16 partai politik yang mengusung 4 pasangan calon. Nomor urut 1 pasangan H. Suharto, SH–H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I yang diusung oleh gabungan partai

politik: PDI-P dan PKB, nomor urut 2 pasangan H. Sutrisno, SE–Slamet, S.Pd, MM yang diusung oleh gabungan partai politik: Partai Demokrat, Partai Golkar, PPRN, PDP, dan PKPI. Kemudian nomor urut 3 pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos yang diusung oleh PAN. Terakhir nomor urut 4 adalah pasangan H. Yanto, SH–Ngadiyono yang diusung oleh gabungan partai politik: PKPB, Partai Gerindra, PBB, Partai Hanura, Partai Barnas, PPDI, PDK, dan PDS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil”, pelaksanaan pemilukada di Gunungkidul dinilai telah sesuai dengan asas-asas umum pemilihan kepala daerah. Kemudian, berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang mengamanatkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh lebih dari 30% dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbesar atau terbanyak dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos dengan perolehan suara 146.849 atau 36,03% dengan kemenangan di delapan kecamatan dari total 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, KPUD Kabupaten Gunungkidul memutuskan untuk menetapkan pasangan nomor urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 31/Pemilukada/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010. Karena pada putaran pertama Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 sudah ada pasangan calon yang mencapai lebih dari 30% dan menjadi pasangan calon terpilih, maka tidak dilakukan pemilukada putaran kedua. Hasil ini dapat mencerminkan demokratisasi masyarakat Gunungkidul, sehingga tidak dimungkinkan adanya sengketa hasil pemilu.

1. Strategi Komunikasi Politik PAN dalam Memenangkan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Perkembangan masyarakat mempengaruhi strategi komunikasi politik. Dengan semakin terbukanya kebebasan berekspresi, maka bentuk-bentuk komunikasi politik semakin beragam. Pendekatan komunikasi politik tidak dapat lagi menggunakan cara-cara lama. Sehingga partai politik harus bisa menyesuaikan bentuk komunikasi politik yang dipilih dengan keadaan masyarakatnya (Firmanzah, 2012: 83).

a. Tahapan Pemilukada PAN Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Pasangan yang berhak maju ke ajang pemilihan kepala daerah salah satunya adalah pasangan yang memiliki kendaraan politik. Artinya, pasangan tersebut diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik

yang juga telah memenuhi syarat sebagai partai pengusung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 07/Pemilukada/2009 tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari 45 jumlah kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul atau 7 kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atau 15% dari 394.525 atau 59.179 suara sah.

PAN Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik pengusung pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil daerah. Ini dapat dilihat dari perolehan suara PAN dalam pemilu legislatif tahun 2009 yang memperoleh urutan kedua, dengan perolehan kursi sebanyak 9 kursi, di bawah PDI-P.

Ketika pemilukada mulai berhembus di kalangan masyarakat Gunungkidul, PAN juga sudah mulai melakukan konsolidasi internal partai untuk segera mengkonsep apa yang akan dilakukan oleh partai untuk menghadapi bursa pemilihan kepala daerah yang hanya diadakan 5 tahun sekali ini. Sebagai partai politik yang bisa dikatakan besar di Gunungkidul, tentunya PAN juga ingin mempertahankan eksistensi dan

stabilitas politiknya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengikuti ajang pemilu tersebut. Apalagi dalam hal ini posisi PAN memang telah memenuhi syarat sebagai partai pengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilu Kabupaten Gunungkidul tahun 2010.

PAN dan PKB pada dasarnya adalah partai-partai yang berbasiskan dukungan massa Islam, yang sejak masa *pasca* Orde Baru memberikan kesempatan lahirnya kembali struktur religio politik di Indonesia. Fenomena ini akan memberikan peluang untuk terjadinya pola hubungan Islam dan negara yang lebih akomodatif, bahkan integratif. Pergumulan peranan politik Islam di Indonesia pada era reformasi secara *real* dapat dilihat dari hasil perolehan suara partai-partai politik Islam ataupun partai-partai yang berbasiskan dukungan umat Islam. Hasil Pemilu 1999, telah menghasilkan partai-partai politik yang meraih dukungan signifikan dari masyarakat. Ada enam partai yang mampu memenuhi batas minimal electoral threshold 2%. Dari enam partai tersebut diantaranya adalah partai-partai Islam (PPP, PBB, PK) ataupun partai yang berbasiskan dukungan massa Islam (PKB, PAN).

PAN sebagai partai politik memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam rangka mengadakan proses rekrutmen politik ini, DPD

PAN Gunungkidul menerapkan sistem rekrutmen terbuka dan apa adanya. Terbuka di sini mengandung pengertian bahwa PAN menyeleksi untuk memilih yang terbaik dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan prinsip atau visi atau misi yang dimiliki PAN itu sendiri. Artinya, PAN membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang merasa layak dan siap untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Gunungkidul, dengan tidak membatasi pada satu golongan atau kader struktural partai saja.

PAN sebagai salah satu dari dua partai politik di Kabupaten Gunungkidul yang berhak mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan mekanisme yang panjang untuk mengadakan rekrutmen. Untuk menjaring bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung, PAN Kabupaten Gunungkidul membuka pendaftaran dengan kesempatan yang sama. Dalam proses rekrutmen itu terdapat tiga orang yang mendaftarkan diri sebagai kepala daerah, yaitu H. Suharto, SH, Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dan H. Dalil Suhadi, SE. Kemudian yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil kepala daerah hanya satu orang saja, yaitu Hj. Badingah, S.Sos. Panitia seleksi dari PAN Gunungkidul kemudian melakukan beberapa proses seleksi (*fit and proper test*), antara lain:

- 1) Penyampain visi dan misi bakal calon dengan mengundang panelis dari internal PAN, akademisi, dan praktisi (wartawan) yang bertempat di gedung PDHI Kabupaten Gunungkidul.

- 2) Penyampaian penilaian dengan *form* khusus untuk dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bakal calon mana yang akan diusung oleh PAN.
- 3) Mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh Pengurus Harian DPD PAN Gunungkidul dan seluruh ketua/perwakilan DPC se-Kabupaten Gunungkidul. Dalam rapat pleno tersebut diadakan *voting*, karena masing-masing DPC mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan dukungan terhadap calon kepala daerah yang ada. Hasil *voting* menunjukkan bahwa H. Suharto, SH mendapat 56 dukungan; Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc mendapat 75 dukungan; sedangkan H. Dalil Suhadi, SE tidak mendapatkan dukungan. Dua nama yang mengantongi suara terbanyak ini kemudian dilaporkan ke DPW PAN DIY untuk mendapatkan rekomendasi.
- 4) Dalam *voting* yang dilakukan di DPW PAN DIY, hasil yang didapat hampir sama dengan hasil *voting* rapat pleno DPD PAN Gunungkidul. Akhirnya DPW PAN DIY memutuskan untuk mengusung Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc bersama Hj. Badingah, S.Sos yang menjadi satu-satunya pendaftar bakal calon kepala daerah.
- 5) Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009, DPW PAN DIY melaksanakan rapat pengurus harian DPW PAN DIY untuk memutuskan 1 (satu) pasangan calon kepala daerah dan wakil

kepala daerah dari PAN Gunungkidul. Dan pasca rapat PH DPW PAN DIY pada tanggal 28 Desember 2009 tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: PAN/12/Kpts/K-S/10/XII/2009 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Periode 2010–2015 dari Partai Amanat Nasional yang memutuskan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos sebagai calon bupati dan wakil bupati dari PAN Kabupaten Gunungkidul.

Ketika proses rekrutmen berakhir dengan menghasilkan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dan Hj. Badingah, S.Sos sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung dalam Pemilu 2010, PAN segera melakukan langkah dengan memulai merencanakan strategi pemenangan apa yang akan dilaksanakan. Sehingga *pasca* dikeluarkan dan diserahkannya Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PAN oleh DPW PAN DIY, DPD PAN Gunungkidul pada tanggal 2 Januari 2010 menggelar rapat koordinasi dengan pengurus harian DPD dan DPC PAN se-Gunungkidul. Kemudian dilanjutkan rapat koordinasi DPD PAN Gunungkidul dengan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pada tanggal 5 Januari 2010, dan pada tanggal 12 Januari 2010 diadakan rapat koordinasi lanjutan.

Disusul kemudian dengan rapat pembentukan tim kampanye dan pemenangan pasangan Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj.

Badingah, S.Sos Kabupaten Gunungkidul yang diambil dari pengurus PAN dan relawan pendukung pasangan calon, pada tanggal 13 Januari 2010. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa strategi yang matang, tepat sasaran dan dilakukan sedini mungkin akan menghasilkan dukungan suara yang semakin banyak pula. Dalam hal PemiluKabupaten Gunungkidul tahun 2010, PAN sebagai partai pengusung pada akhirnya juga melakukan kerja sama dengan PKS. Pasangan ini didukung oleh PKS yang tidak dapat mengajukan calon secara mandiri, yang mendeklarasikan diri untuk bergabung dengan PAN pada tanggal 8 Februari 2010 di Joglo Jawa Wonosari. Tidak dipungkiri bahwa akhirnya PKS pun ikut berperan serta dalam rangka memenangkan pasangan yang diusung PAN pada pemiluKabupaten Gunungkidul tahun 2010.

b. Strategi Komunikasi Politik PAN dalam Memenangkan PemiluKabupaten Gunungkidul Tahun 2010

Komunikasi politik sebagai suatu proses, setidaknya dapat dipahami dengan melibatkan lima unsur, yaitu: aktor atau partisipan, pesan, saluran, situasi atau konteks, dan pengaruh atau efek. Dalam pembahasan ini, aktor atau partisipan adalah pasangan Sumpeno-Badingah, tim sukses dan konstituen. Sedangkan pesan yang disampaikan berupa pesan-pesan politik dalam bentuk ajakan untuk memilih Sumpeno-Badingah. Saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan politik itu antara lain dilakukan melalui proses sosialisasi, kampanye, dan sebagainya. Situasi dan konteks yang terjadi adalah masa kampanye dalam PemiluKabupaten

Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Sedangkan pengaruh atau efeknya adalah keputusan konstituen untuk memilih pasangan ini atau pasangan lain yang juga melakukan aktivitas komunikasi politik kepada mereka.

Strategi yang berupa pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukung, massa mengambang, dan pendukung lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara, juga untuk mengidentifikasi strategi apa yang diperlukan untuk masing-masing kelompok pemilih (Firmanzah, 2012: 109). Karena dalam rangka memenangkan suatu kompetisi dalam pemilihan umum, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya beberapa strategi pemenangan, salah satunya dengan menyusun strategi komunikasi politik.

Komunikasi politik memiliki peran yang vital dalam Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, seperti halnya pada sistem politik maupun kegiatan politik yang lainnya. Beberapa bulan sebelum tanggal 23 Mei 2010 yang ditetapkan sebagai hari pencoblosan tiba, bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah telah aktif melakukan lobi, negosiasi, dan beragam upaya lain yang mengarah pada terkumpulnya dukungan bagi pencalonan mereka. Selain bakal calon, partai-partai yang bersaing baik sebagai partai pengusung maupun partai pendukung juga aktif melakukan komunikasi politik untuk memperoleh kemenangan dan stabilitas politik *pasca* pemilukada.

Proses yang panjang dan sulit untuk menempati posisi Gunungkidul I dan II ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta tim sukses. Pada dasarnya, tim sukses inilah yang menjadi mesin politik untuk memobilisasi konstituen agar memilih kandidat kepala daerah-wakil kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri jika kerja keras yang dilakukan tim sukses secara nyata di lapangan berperan besar dalam kemenangan seorang kandidat. Untuk membantu pasangan Sumpeno–Badingah, maka sebagai komunikator politik bergeraklah mesin politik yang terorganisir dalam tim sukses. Tim sukses yang dimiliki oleh pasangan ini menjadi bagian vital dalam upaya kemenangan pemilukada tahun 2010 lalu. Tim yang ada dapat dikatakan memiliki kompleksitas jaringan yang tinggi, namun tetap dapat efektif dan efisien dalam menggerakkan konstituen agar memilih pasangan ini.

PAN sebagai partai pengusung pasangan Sumpeno–Badingah melakukan berbagai upaya agar calon yang diusungnya mampu memenangkan pemilukada. Tim inilah yang menjadi tim sukses resmi, karena pasangan Sumpeno–Badingah mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Gunungkidul dengan “mengendarai” PAN. Tim ini juga memiliki tugas dalam bidang-bidang teknis mulai sebelum kampanye sampai setelah penghitungan suara. Tim ini terbagi dalam dua kelompok besar, Tim PAN dan Tim PKS. Masing-masing tim membuat agenda kemenangan sesuai segmentasi konstituen masing-masing dengan koordinasi dari ketua tim kemenangan, Drs. Sutata yang juga menjabat

sebagai Ketua Umum DPD PAN Kabupaten Gunungkidul pada waktu itu. Beberapa strategi yang dilakukan tim pemenangan ini antara lain:

1) Agenda Temu Warga (Program 1000 Padukuhan)

Membangun suatu *image* politik tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi politik. Komunikasi politik yang dimaksud dalam hal ini adalah semua hal yang dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan-balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang tidak hanya dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat, tetapi juga dari masyarakat kepada partai politik. Mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, tersebar dan terkadang tidak terorganisir, akan sulit membayangkan adanya sistematisasi komunikasi pesan yang dilakukan masyarakat kepada partai politik. Hal ini kemudian membuat partai politik sebagai organisasi yang terorganisir harus mengambil inisiatif untuk mentransfer sekaligus merumuskan sinyal-sinyal atau pesan yang disampaikan oleh masyarakat (Firmanzah, 2012: 257).

Sejak dari jauh-jauh hari PAN telah mulai melancarkan strategi kampanye yang bertujuan untuk mensosialisasikan calon dan menggalang dukungan massa sebanyak-banyaknya. Konsep kampanye PAN lebih bersifat dialogis, artinya kampanye secara tatap muka. Selama tiga bulan, tim sukses memfasilitasi sekitar 750

pertemuan antara Sumpeno–Badingah dengan warga masyarakat di dusun-dusun di seluruh Kabupaten Gunungkidul. Dalam acara ini Sumpeno–Badingah berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di samping tujuannya memang untuk mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa mereka akan maju menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah, acara ini juga digunakan untuk memahami kondisi masyarakat yang ada. Namun apabila kandidat tidak dapat hadir, maka telah ada tim sukses yang akan menggantikan posisi pasangan ini dalam menjalin interaksi dengan masyarakat.

Pesan politik yang disampaikan oleh Pasangan Sumpeno–Badingah dan tim sukses disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dari masyarakat. Dalam pertemuan yang dilakukan itu, pasangan ini melakukan sosialisasi politik sekaligus pembentukan citra positif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan salah satunya dalam rangka mempengaruhi orientasi maupun tingkah laku politik seseorang melalui persepsi masyarakat terhadap pasangan calon atau suatu partai politik tertentu, mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas politik.

Temu warga dimulai dengan mendaftar tempat-tempat yang akan dikunjungi untuk diverifikasi oleh tim, dan diserahkan kepada petugas yang ada agar mensinkronkan jadwal kepada Sumpeno Putro maupun Badingah. Namun usaha menyampaikan berbagai pesan politik kepada masyarakat ini pada akhirnya dilakukan tidak sampai

seribu padukuhan, karena sampai masa akhir kampanye baru tercapai sekitar 750 padukuhan. Akan tetapi, dari jumlah yang ada tersebut sebenarnya sudah dapat dibaca kemungkinan pasangan untuk memenangkan pilkada tahun 2010. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Drs. Sutata:

“.... Model gerakan ditargetkan untuk dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat di 1000 titik, akan tetapi baru sekitar 750 titik sudah terdengar gaung suara yang cukup kuat untuk mendukung Sumpeno Putro-Badingah. Komunikasi politik di 1000 titik ini dilakukan dengan “temu warga”, yang dimediasi oleh tim sukses. Temu warga dimulai dengan mendaftar tempat-tempat yang akan dikunjungi, kemudian diverifikasi oleh tim dan diserahkan kepada petugas untuk mensinkronkan jadwal ke Ibu Badingah dan Pak Sumpeno Putro ...”.

2) Pertemuan-pertemuan Terbatas di antara Pengurus Internal Partai

Pertemuan-pertemuan terbatas di antara pengurus internal partai dilakukan dengan tujuan konsolidasi tim agar memiliki kebulatan suara dalam mendukung pasangan Sumpeno–Badingah pada Pilkada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai taktik kemenangan, evaluasi taktik, menyeimbangkan kepentingan antar pendukung agar tidak

terjadi keributan, serta analisis serangan propaganda dan survei politik untuk mengetahui peta politik yang berkembang khususnya tentang tingkat kepopuleran Sumpeno–Badingah. Rapat ini biasanya dilakukan minimal satu kali dalam seminggu.

3) Rapat Umum

Kampanye pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan orang atau kelompok (organisasi) dalam waktu tertentu untuk memperoleh dan memperkuat dukungan politik dari rakyat atau pemilih. Kampanye merupakan salah satu kegiatan komunikasi politik yang paling semarak dan melibatkan banyak orang. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang pemilihan umum, baik pemilu legislatif, presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada).

Salah satu jenis kampanye yang digunakan adalah kampanye massa, yaitu kampanye politik yang ditujukan kepada massa (orang banyak), yang dilakukan baik melalui hubungan tatap muka maupun dengan menggunakan berbagai media, seperti surat kabar, radio, televisi, film, spanduk, baliho, poster, pamflet, serta melalui media internet. Ketika kampanye politik pada Pemilukada Gunungkidul tahun 2010 resmi dibuka oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul, selain melakukan kampanye secara tatap muka PAN juga melakukan kampanye massa. Salah satu bentuk kampanye massa yang dilakukan PAN pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun

2010 yaitu dengan menggelar rapat umum di Lapangan Desa Piyaman. Dalam rapat umum yang digelar PAN tersebut dihadirkan pula juru kampanye yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), seperti Mumtaz Rais dan artis Primus Yustisio.

4) Agenda Turun ke Pasar (Garebeg Pasar)

Selain temu warga, PAN juga melakukan terobosan-terobosan lain untuk mengomunikasikan pesan politiknya, seperti diadakannya agenda turun ke pasar di Gunungkidul. Cara ini belum pernah digunakan pada pemilukada, dan baru digunakan pada saat mengusung pasangan Sumpeno–Badingah saja. Hal ini dilakukan untuk Saat itu menjaring ibu-ibu, karena pada dasarnya suara perempuan di Gunungkidul memiliki potensi yang besar. Agenda ini dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan cara membeli beberapa barang dari pedagang-pedagang yang ada di pasar tersebut.

Agenda turun ke pasar ini dalam sehari minimal dilaksanakan di dua pasar, atau terkadang bisa mencapai tiga atau empat pasar berbeda setiap harinya. Dalam hal ini bakal calon biasanya ikut turun langsung ke pasar, tetapi jika berhalangan maka telah ada tim sukses perempuan yang menggantikan. Sebagaimana diungkapkan Amri Dwi Suahya, S.Si:

“.... Untuk agenda turun ke pasar belum pernah dilakukan, dan baru saat Pak Sumpeno ini. Saat itu belum ada yang menyoar ibu-ibu, padahal ibu-ibu merupakan pasar besar. Agenda turun ke pasar ini dalam sehari minimal dilaksanakan di dua pasar, dan terkadang sampai tiga atau empat pasar. Calon ikut turun langsung atau tim sukses perempuan”.

5) Pemasangan Gambar atau Alat Peraga Lain

Media luar ruang yang dipakai oleh pasangan Sumpeno-Badingah antara lain adalah spanduk, baliho, poster, leaflet, kalender 2010, dan kaos yang bergambar pasangan Sumpeno-Badingah. Bidang khusus yang menyediakan atribut pasangan ini adalah bidang logistik. Ada beberapa pertimbangan tim pemenang juga menggunakan media luar ruang ini, antara lain karena mempunyai dampak yang tinggi terhadap orang yang melihatnya, keseluruhan isinya cukup sulit diabaikan oleh orang yang melihatnya, memiliki biaya yang lebih kecil jika dibandingkan melalui media lain, dan sebagainya.

6) Aksi-aksi Sosial

Selain melaksanakan agenda temu warga, pertemuan-pertemuan terbatas di antara pengurus internal partai, rapat umum, agenda turun ke pasar, dan pemasangan gambar atau alat peraga lain, PAN juga melakukan kerja sama dengan IKG dalam Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Dalam hal Pemilukada Kabupaten

Gunungkidul tahun 2010, kerja sama yang dilakukan dengan IKG yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk mendekati masyarakat, misalnya dengan melakukan aksi *fogging* (pengasapan) di daerah-daerah yang diduga sebagai tempat berkembangnya jentik dan nyamuk penyebab demam berdarah (DB). *Fogging* ini dilakukan jauh sebelum kampanye resmi dibuka oleh KPUD kabupaten Gunungkidul.

Selain itu, IKG juga membagikan amunisi kampanye dengan memberikan bahan batik kepada konstituen. Karena pada intinya kegiatan yang dilakukan IKG dalam menggalang suara konstituen adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yang tidak secara langsung bersinggungan dengan gerakan politik pasangan Sumpeno–Badingah.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Komunikasi Politik Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PAN

Komunikasi adalah suatu proses yang mencoba membangun pemahaman bersama akan suatu hal. Komunikasi dalam hal ini melibatkan dua pihak atau lebih. Tujuan utama komunikasi bukan sekedar memberikan data dan informasi kepada pihak lain, tetapi lebih dari itu berusaha membangun pemahaman bersama agar kedua belah pihak memiliki persepsi yang sama mengenai suatu hal tertentu. Untuk membangun dan menciptakan kebersamaan persepsi memang tidak mudah, harus dibutuhkan keterbukaan masing-masing pihak yang terlibat dalam proses komunikasi untuk dapat

saling membuka diri dan menerima masukan dari pihak lain. Kemudian dibutuhkan pula keinginan berbagi yang dilandasi oleh *'trust'* (saling memercayai) di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Proses komunikasi merupakan proses yang sangat kompleks, terutama ketika proses komunikasi ini digunakan dalam usaha membangun *image* politik. Yang penting bukan hanya data dan informasi, namun pesan-pesan simbolis yang ada di balik data dan informasi. Pesan simbolis itulah yang dapat membentuk *image*, bukan data dan informasinya. Data dan informasi membutuhkan interpretasi lebih dahulu untuk bisa dimaknai. Ketika partai politik mencoba mentransfer makna, yang akan ditransfer adalah pesan-pesan simbolis (Firmanzah, 2012: 258-259).

a. Kinerja Mesin Partai

Pelaksanaan pilukada Gunungkidul tahun 2010 telah berakhir dengan kemenangan berada di tangan Sumpeno–Badingah yang diusung oleh PAN dan didukung oleh PKS. Dalam pilukada ini PAN mampu unggul di delapan kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Gunungkidul. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gunungkidul, pasangan calon nomor urut 3 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos memperoleh jumlah suara terbesar dengan perolehan suara 146.849 atau 36,03%.

PAN sebagai sebuah partai yang menggunakan berbagai strategi dalam rangka memenangkan Pemilu pada Gunungkidul 2010, mampu maju dalam pemilu dengan kesiapan strukturnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemenangan Sumpeno–Badingah apabila ditinjau dari segi kinerja mesin partai.

Pertama, PAN berperan total mulai dari persiapan sampai pelaksanaan pemilu. PAN membuat jaringan kader dari kabupaten sampai tingkat ranting. Hal ini dilengkapi dengan mengadakan sosialisasi dan konsolidasi agar semua kader memiliki semangat untuk berjuang demi Sumpeno–Badingah dan mengetahui *job description* masing-masing. Dengan strategi tersebut, PAN berusaha mengefektifkan mesin partai beserta kader-kader yang dimiliki. Setiap tahapan proses yang dilakukan PAN berdasarkan konsep yang matang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Kedua, setelah mendapatkan keputusan bakal calon yang akan diusung, PAN mulai mencitrakan figur yang diusungnya. Pada dasarnya Sumpeno bukan kader struktural Muhammadiyah, sehingga untuk mencitrakan dirinya adalah tokoh religius juga tidak otomatis. Untuk mencitrakan sebagai tokoh religius, PAN mensosialisasikan pasangan calon kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Hal ini juga sekaligus digunakan untuk membuat jaringan yang terstruktur rapi. Di samping jaringan kader yang dibentuk sampai tingkat ranting, PAN juga

menguatkan posisinya dengan menguatkan jaringan Muhammadiyah yang ada di Gunungkidul.

Ketiga, kekuatan kompetitor telah diperhitungkan dengan matang oleh PAN. Sehingga PAN selalu berusaha memonitor gerakan politik lawan, agar mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan.

Keempat, PAN menggunakan jargon “*Ndeso* Makmur Gunungkidul Makmur” dalam kampanyenya. Kemudian visi pasangan Sumpeno–Badingah adalah “terwujudnya Gunungkidul yang lebih maju, makmur, dan sejahtera”. Hal ini dipilih dengan harapan akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Gunungkidul yang mengidamkan perbaikan kondisi yang ada di masa depan.

Kelima, PAN melakukan strategi komunikasi politik dengan cara mengadakan kegiatan temu warga (Program 1000 Padukuhan) dan agenda turun ke pasar (Garebeg Pasar) yang dinilai efektif dan efisien untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat.

Keenam, PAN melakukan optimalisasi saksi pada hari pencoblosan. Menjelang hari pencoblosan, tim sukses telah dapat memastikan bahwa seluruh calon saksi sudah dibekali dengan logistik maupun materi sosialisasi pasangan Sumpeno–Badingah. Tim sukses mengambil kebijakan bahwa setiap TPS akan dikawal oleh dua orang saksi. Saksi pertama berasal dari unsur PAN, sedangkan saksi kedua berasal dari unsur PKS, IKG dan relawan lainnya.

Ketujuh, PAN memiliki kemampuan *political marketing* yang baik. Kemampuan *political marketing* ini tidak hanya dimiliki tim inti sebagai konseptor saja, tetapi juga diusahakan dimiliki oleh semua kadernya. Kemampuan *political marketing* ini diaplikasikan dalam usaha kampanye. Tim inti mencakup materi dan strategi kampanye, kemudian tim-tim yang berada di bawah mengaplikasikannya ke kondisi *riil* lapangan. Strategi-strategi kampanye yang tidak hanya berbasis pada daerah pemilihan (dapil atau zona) saja, tetapi berbasis kecamatan dan desa terbukti lebih mengena dalam masyarakat, dan dapat menjangkau dukungan yang lebih banyak.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kemenangan berada di tangan Sumpeno–Badingsah. Totalitas peran PAN sebagai partai pengusung sangat berpengaruh, sehingga unsur partai pengusung (ditambah partai pendukung) dan pasangan calon merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan karena sifatnya saling melengkapi demi mencapai tujuan bersama.

b. Pengaruh Jaringan Muhammadiyah

Sergiovanni dan Corbally mengemukakan tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pemimpin, yakni *popularity*, *acceptability*, dan *capability*. *Popularity* atau popularitas, menunjuk kepada dikenal atau tidak dikenalnya seorang calon pemimpin oleh masyarakat. *Acceptability* atau akseptabilitas, menunjuk kepada penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh politik. Penerimaan ini

akan muncul manakala rakyat merasa sang tokoh benar-benar dapat menyuarakan kepentingan mereka. Sang tokoh harus dapat dirasakan sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh dinamika kehidupan masyarakatnya. *Capability* atau kapabilitas, menunjuk kepada kemampuan intelektual tokoh politik. Kemampuan untuk menyerap aspirasi rakyat, merumuskan aspirasi itu ke dalam bentuk pernyataan yang jelas, dan menyampaikan hasil rumusan itu kepada masyarakat dalam bahasa yang dapat dimengerti rakyatnya (Riswandha Imawan, 1998: 30-31).

Ketiga hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan PAN untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh PAN pada waktu mengadakan proses rekrutmen dan seleksi, dalam hal ini memenuhi ketiga unsur tersebut. Selain karena pasangan Sumpeno–Badingah memiliki akseptabilitas dan kapabilitas yang baik, pertimbangan yang tidak kalah penting adalah tingkat popularitas Hj. Badingah, S.Sos di kalangan Muhammadiyah yang tidak diragukan lagi.

Muhammadiyah secara *de jure* memang tidak mempunyai hubungan subordinatif dengan PAN, tetapi tidak dipungkiri bahwa kedekatan Muhammadiyah dengan PAN tetap tidak dapat ditutupi. Hal ini tidak lain dikarenakan sejarah telah mencatat bahwa pendiri PAN adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain itu, PAN

di Gunungkidul dibidani oleh PDM Kabupaten Gunungkidul. PAN di Gunungkidul oleh PDM diserahkan kepada 11 orang yang pada akhirnya disebut panitia sebelas penyusunan pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul, hingga terbentuklah Pengurus DPD PAN Kabupaten Gunungkidul.

Muhammadiyah memiliki massa yang cukup banyak di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Sebagai organisasi keagamaan tentunya Muhammadiyah tidak dapat melakukan upaya politik praktis, namun dengan banyaknya jumlah massa Muhammadiyah diharapkan dapat ikut menitipkan kebijakannya apabila berpartisipasi dalam mendukung bakal calon kepala daerah. Sehingga posisi Hj. Badingah, S.Sos yang pernah menjadi penasehat 'Aisyiyah juga digunakan untuk melakukan pencitraan dan komunikasi politik kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah dari semua unsur agar menjadi yakin dalam memberikan dukungan suaranya.

c. Pengaruh Jaringan IKG

PAN juga bekerja sama dengan IKG dalam Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010. Hal ini dilakukan karena calon kepala daerah yang diusung PAN, yaitu Sumpeno Putro sejak jauh-jauh hari telah menjalin komunikasi dengan IKG. Dalam hal Pemilukada Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, pengerahan massa dengan mendanai para perantau untuk pulang dan mengajak sanak kerabat dan masyarakat untuk

memilih pasangan Sumpeno–Badingah dalam pemilu juga menjadi agenda IKG.

Selain itu IKG juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk mendekati masyarakat, misalnya dengan melakukan aksi *fogging* (pengasapan) di beberapa tempat. Pada intinya kegiatan yang dilakukan IKG dalam menggalang suara konstituen adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, yang tidak secara langsung bersinggungan dengan gerakan politik pasangan Sumpeno–Badingah. Sehingga kegiatan tim IKG tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan untuk memperoleh pendapat umum. IKG ingin membentuk pendapat umum bahwa pasangan Sumpeno–Badingah adalah sosok pemimpin masa depan Gunungkidul yang memiliki dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

d. Pengaruh Figur Politik

Kualitas seorang figur dalam *political marketing* dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas instrumental, faktor simbolis, dan fenotipe optis. Kualitas instrumental adalah kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional. Kualitas instrumental merupakan sebuah keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melakukan tugasnya. Faktor simbolis seorang tokoh meliputi prinsip-prinsip hidup, aura emosional, aura inspirasional, dan aura sosial seorang tokoh. Kemudian kualitas seorang figur juga dipengaruhi oleh fenotipe optis yang berupa penampakan visual seorang kandidat, misalnya pesona

fisik, faktor kesehatan dan kebugaran seorang kandidat, serta gaya penampilan kandidat tersebut (Adman Nursal, 2004: 207-209).

Faktor figur politik yang diusulkan dalam bursa pemilihan kepala daerah di wilayah dan tingkatan manapun, akan mempunyai pengaruh dalam perolehan suara seorang pasangan calon. Hal ini dikarenakan bahwa tidak dapat dipungkiri jika masyarakat dalam memilih pemimpin eksekutif, pasti melihat dan memperhatikan sosok dan pencitraan calon yang maju dalam pemilihan umum tersebut. Meskipun demikian, seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat mencalonkan diri apabila telah memiliki kendaraan politik, yaitu partai politik. Dan untuk menjadi pengusung pasangan calon kepala daerah, sebuah partai politik harus memenuhi syarat sebagai pengusung pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan.

Saat ini penjualan figur politik telah menjadi strategi yang umum dilakukan oleh partai politik. Partai politik akan selalu berusaha menunjukkan dimensi kelebihan figur untuk memperoleh simpati masyarakat. Maka sebelum melakukan gerilya politik, partai politik harus menilai kualitas seorang figur, ditinjau dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh partai politik itu sendiri. Jadi, dalam hal ini partai politik telah menetapkan pedoman untuk memilih seorang figur yang akan diusungnya dalam suatu kompetisi politik tertentu.

PAN sebagai partai pengusung sangat memperhatikan figur pasangan calon yang akan diusungnya. Oleh karena itu PAN memiliki

mekanisme sendiri dalam rekrutmen, seleksi, dan penentuan pasangan calon yang akan diusung. PAN juga memperhatikan banyak faktor, baik internal maupun eksternal untuk dapat menentukan figur elit politik yang benar-benar sesuai dengan kriteria partai. Ketokohan ini nantinya akan sangat penting, mengingat PAN juga harus mempertimbangkan apakah figur tersebut “layak dijual” atau tidak. Maka ketika PAN memutuskan untuk mengusung Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc dan Hj. Badingah, S.Sos., tentunya banyak pertimbangan mengenai kelebihan dan kekurangan keduanya yang diharapkan dapat saling melengkapi.

Tim melakukan pencitraan terhadap pasangan Sumpeno–Badingah. Pencitraan yang disampaikan adalah bahwa pasangan ini adalah pasangan “*satriyo piningit*” (kesatria terpilih) yang akan memajukan Gunungkidul. Prof. Dr. Ir. H. Sumpeno Putro, M.Sc–Hj. Badingah, S.Sos digambarkan sebagai “Harapan Baru Gunungkidul” untuk mewujudkan “*Ndeso* Makmur Gunungkidul Makmur”. Slogan tersebut dicanangkan pada deklarasi pencalonan pada hari Minggu, 17 Januari 2010, di Balai Desa Wonosari.

Setelah deklarasi, kegiatan sosialisasi lebih diintensifkan sekaligus ditata secara lebih sistematis. Sebelum deklarasi, sosialisasi biasanya dilakukan hanya berdasarkan permintaan sehingga secara geografis menjadi tidak merata. Menyadari hal itu, pola sosialisasi kemudian dikombinasi dengan daerah yang memang dirancang oleh tim sukses. Hal itu penting dicermati karena sesungguhnya 60% penduduk Gunungkidul

hanya terfokus pada 8 dari 18 kecamatan yang ada. Mereka terpusat di kawasan tengah dari ujung barat hingga Timur, yaitu Patuk, Playen, Paliyan, Wonosari, Nglipar, Karangmojo, Semanu dan Ponjong.

Pencitraan yang dilakukan disesuaikan dengan budaya lokal Gunungkidul, yaitu:

- 1) Pakdhe Peno dan Mbokdhe Bading, adalah panggilan akrab pasangan ini.
- 2) Pakdhe Peno dan Mbokdhe Bading, adalah simbol “*satriyo-piningit*” sebagai harapan baru segenap sedulur Gunungkidul. Pasangan pemimpin politik ideal, sebagai perpaduan ideal antara kebaikan yang melekat pada tokoh wayang *satriyo* Dwarawati Prabu Kresno (Sosro Sumpeno) dengan Dewi Sri (mBok Sri).
- 3) Pakdhe Peno dan Mbokdhe Bading, adalah simbol optimisme bagi para *sedulur* (saudara) Gunungkidul, terutama bagi generasi muda dan perempuan Gunungkidul. Walaupun berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan alam yang memiliki berbagai keterbatasan; namun berkat ketekunan dan kesabaran dalam berikhtiar, akhirnya bisa menjadi *priyo lan wanito utomo* (pria utama dan wanita utama).

Tim sukses pasangan Sumpeno Putro–Badingah juga bertekad untuk meraih kemenangan dalam pemilukada secara bermartabat dan bertanggung jawab. Bermartabat, artinya untuk meraih tujuan yang mulia, harus dilakukan dengan cara yang mulia. Bertanggung jawab, artinya berbagai program yang ditawarkan harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, amanah serta kemaslahatan umat.